



Lampiran XI Peraturan Wali Kota Padang Panjang  
Nomor IX Tahun 2025  
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Tahun 2025-2029

## **DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>12</b>
2.1. Gambaran Umum Pelayanan Daerah .....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.5 Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberian pelayanan	
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2. Permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.2.1 Isu Strategis	
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>56</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	56

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	56
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PEYELENGGARA BIDANG URUSAN .....</b>	<b>72</b>
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4.2 Kinerja Peyelenggaraan Bidang Urusan	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan
Tabel 2.5	Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.2	Menyusun Strategi Berdasarkan Isu Strategi
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.4	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan
Tabel 4.1	Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Renstra yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan

mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja tersebut berupa penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak didasarkan pada ketentuan peraturan perundungan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
  30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang dan mewujudkan cita-cita yang ingin

- dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
  3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat perbedaan mendasar dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dalam hal sistematika Renstra Perangkat Daerah, yang semula 8 bab menjadi 5 bab.

Untuk itu, dalam penyusunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mengacu pada ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sistematika sebagai berikut:

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing – masing bab dalam Renstra Tahun 2025 - 2030

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:.

### 2.1 Gambaran Umum Pelayanan Daerah

- 2.1.8 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.1.9 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 2.1.10 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.1.11 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.1.12 Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberian pelayanan (jika ada)
- 2.1.13 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (jika ada)
- 2.1.14 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2 Permasalahan dan isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - 2.2.1.1 Isu Strategis

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Padang Panjang beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang.

### BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu pada Bab ini disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang.

## BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kota Padang Panjang.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Sozial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang meyelenggaraan fungsi:

- a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
- c. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
- d. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

**Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai ayat 1 ( satu) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana,, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat 1 ( satu ) sebagai berikut:

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
  - c. perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan sosial dalam hal penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan potensi sumber kesejahteraansosial, serta pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - d. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
  - e. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;

- f. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan hukum;
- g. penetapan Renstra terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- h. penetapan Renstra perlindungan dan jaminan sosial pemeliharaan anak-anak terlantar serta pengelolaan data fakir miskin;
- i. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- j. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. penetapan Renstra pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- l. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- m. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam pelembagaan pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. merumuskan kebijakan teknis dan rencnaa strategis dalam perlindungan perempuan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

- o. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam peningkatan kualitas keluarga;
- p. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengolahan, sistem data gender anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- q. menetapkan Renstra pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;
- r. pengoordinasian kesekretariatan; pelaksanaan kegiatan
- s. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- t. pengoordinasian pengelolaan perpustakaan pada Dinas; kearsipan dan perpustakaan pada dinas
- u. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional;
- v. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- w. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- x. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengoordinasian program kegiatan;
- c. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;

- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pengoordinasian Fungsional; fasilitasi Kelompok Jabatan
- j. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- k. fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan umum dan kepegawaian; administrasi;
  
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bidang pemberdayaan sosial;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis, pemantauan pekerja sosial. pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga,
- g. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
- h. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan:
- i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- j. pemberian bimbingan teknis serta supervisi. pemantauan dan evaluasi penggalian potensi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- l. pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- n. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- o. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- p. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- q. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan bantuan kewirausahaan sosial; stimulan dan

- r. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan sosial;
- s. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan;
- t. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- u. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- v. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- w. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi, pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pemberdayaan masyarakat;
- y. pengoordinasian kegiatan penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- z. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, cvaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang rehabilitasi sosial. dan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi. scrtta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau di luar lembaga:

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak dan balita terlantar;
- k. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- l. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial perlindungan khusus; anak yang memerlukan
- m. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;

- n. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi pengemis, bekas sosial gelandangan, binaan warga lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- p. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti/atau di luar lembaga;
- q. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- r. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- s. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis. serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- t. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- u. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi;
- v. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

- w. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- x. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- y. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyiapan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - c. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  - d. mengoordinasikan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - e. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di

- dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. memfasilitasi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - g. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan data dan informasi;
  - h. mengoordinasikan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - i. mengoordinasikan penyiapan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
  - j. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - k. pelaksanaan layanan koordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pelembagaan pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak, lembaga penyedia layanan kualitas keluarga kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakkan;
  - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
  - f. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana Daerah;
  - g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana Daerah;
  - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
  - j. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
  - k. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - l. pendayagunaan tenaga penyuluhan keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
  - m. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pembinaan keluarga balita, ketahanan remaja, keluarga lansia dan rentan;
  - n. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

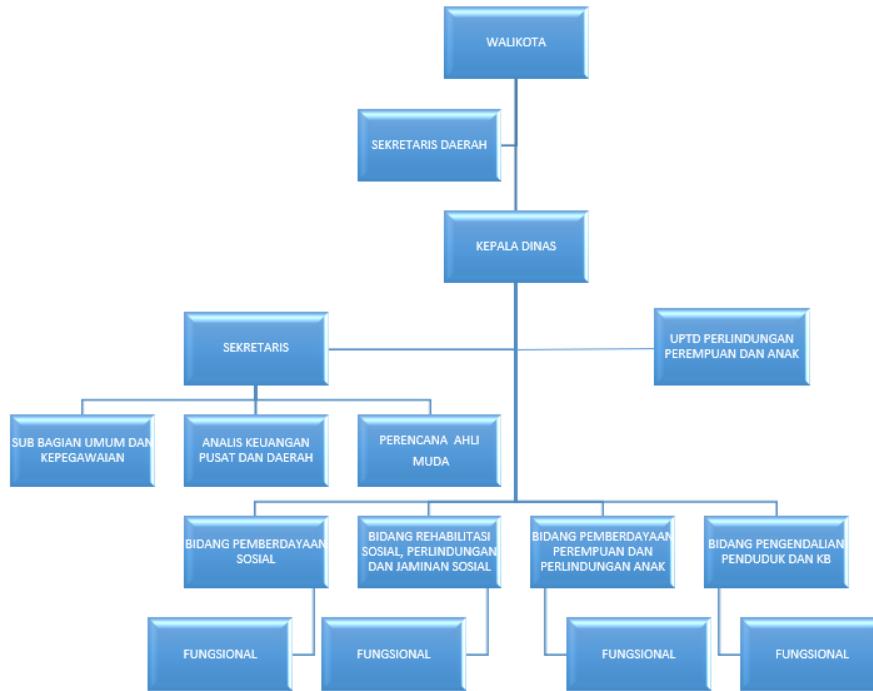
- o. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- p. pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG**  
**PANJANG**



#### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan

profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai struktur organisasi terdiri dari beberapa 4 bidang dan 1 UPTD yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebanyak 36 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 5 orang
3. Eslon IV : 1 orang
4. Pejabat fungsional : 9 orang
5. Staf/Non Eslon : 20 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 36 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 6 orang
2. Sarjana S-1 : 25 orang
3. Diploma -3 : 2 orang
4. SLTA : 3 orang

Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Station Wagon	1	50.000.000	SUZUKI / CARRY FUTURA T120	1	50.000.000	Rusak Berat
2	Station Wagon	1	110.000.000	TOYOTA / KIJANG	-	-	-
3	Sepeda Motor	1	7.000.000	HONDA / MCB	1	7.000.000	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	1	12.000.000	HONDA / NF100D	1	12.000.000	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	1	7.200.000	HONDA / NF100D	1	7.200.000	Rusak Berat
6	Kursi Tamu	1	4.386.000	-	-	-	-
7	Sepeda Motor	1	7.200.000	HONDA / NF100D	1	7.200.000	Rusak Berat
8	Gerobak Dorong	1	900.000	-	-	-	-
9	perkakas bengkel lainnya (dst) service	1	12.286.000	-	-	-	-
10	Rak Besi	5	4.725.000	-	-	-	-
11	Lemari Kaca	2	3.500.000	-	-	-	-
12	Meja 1/2 Biro	1	12.208.400	-	-	-	-
13	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	33.075.000	-	-	-	-
14	Lemari Es	2	4.400.000	-	-	-	-
15	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	2.363.000	Hitachi	-	-	-
16	Camera film	1	3.780.000	-	1	3.780.000	Rusak Berat
17	Gordyn/Kray	1	4.000.000	-	-	-	-
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	8.751.000	-	-	-	-
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	48.335.000	-	-	-	-
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.071.100	-	-	-	-
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	9.450.000	Chairman	-	-	-
22	Layar Film/Projector	1	57.016.750	Toshiba	-	-	-
23	Handy Talky (HT)	1	1.925.000	Aicom	-	-	-
24	Software Computer Conf Off-Line	1	19.943.000	Acer	-	-	-
25	Brandkas	1	3.308.000	President	1	3.308.000	Rusak Berat
26	Kursi Tamu	2	10.000.000	-	-	-	-
27	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	845.000	Pulley SAR	-	-	-
28	Meja Komputer	1	1.131.000	-	-	-	-
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.954.000	Alat Evakuasi	-	-	-
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.246.000	Alat Evakuasi	-	-	-
31	Alat Pembantu Kebakaran	1	1.043.000	Alat keselamatan	-	-	-
32	Alat Pembantu Kebakaran	1	1.043.000	Alat Evakuasi	-	-	-
33	Tenda	1	3.000.000	Tenda Pengungsi	-	-	-
34	Tenda	1	1.750.000	Tenda Pengungsi	-	-	-
35	Pick Up	1	140.000.000	Rescue TAGANA	-	-	-
36	Rak Kayu	1	1.700.000	-	-	-	-
37	Filing Cabinet Besi	2	3.400.000	-	-	-	-
38	Brandkas	1	5.000.000	-	1	5.000.000	Rusak Berat
39	Lemari Makan	13	23.700.000	-	13	23.700.000	Rusak Berat
40	White Board	3	3.125.000	-	13	3.125.000	Rusak Berat
41	Papan Nama Instansi	1	1.200.000	Papan nama rumah singgah	13	1.200.000	Rusak Berat
42	Papan Pengumuman	1	2.000.000	Papan pengumuman Rumah Singgah	13	2.000.000	Rusak Berat
43	Alat Kantor Lainnya	1	1.950.000	-	1	1.950.000	Rusak Berat
44	Meja Rapat	1	8.000.000	-	1	8.000.000	Rusak Berat
45	Kursi Rapat	1	750.000	-	1	750.000	Rusak Berat
46	Sofa	1	5.000.000	-	-	-	-
47	Televisi	1	4.000.000	-	1	4.000.000	Rusak Berat
48	Televisi	1	1.800.000	-	1	1.800.000	Rusak Berat
49	Unit Power Supply	1	2.010.000	-	1	2.010.000	Rusak Berat
50	Camera film	1	4.000.000	-	1	4.000.000	Rusak Berat
51	Handy Cam	1	8.400.000	-	1	8.400.000	Rusak Berat
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	4.400.000	-	-	-	-
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	8.000.000	-	-	-	-
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.880.000	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4.800.000	-	-	-	-
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.200.000	-	-	-	-
57	Layar Film/Projector	1	24.850.000	-	1	24.850.000	Rusak Berat
58	Komputer Jaringan lainnya	2	17.300.000	-	1	17.300.000	Rusak Berat
59	Lap Top	1	12.400.000	-	1	12.400.000	Rusak Berat
60	Monitor	2	3.200.000	-	1	3.200.000	Rusak Berat
61	Micro Bus ( Penumpang S/D 29 Orang )	15	439.000.000	Mobil pelayanan KB	1	439.000.000	Rusak Berat
62	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
63	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
64	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
65	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
66	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
67	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
68	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	1	14.300.000	Rusak Berat
69	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	1	14.300.000	Rusak Berat
70	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
71	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
72	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
73	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
74	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
75	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
76	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
77	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
78	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
79	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
80	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
81	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
82	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
83	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
84	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan
85	perkakas terpasang lainnya (dst) konstruksi pada logam pondasi	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasiikan ke Kecamatan

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
86	perkakas konstruksi terpasang pada logam lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutuskan ke Kecamatan
87	perkakas konstruksi terpasang pada logam lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutuskan ke Kecamatan
88	Mesin Portable (11-13 Inci) Ketik Manual	1	2.500.000	OLYMPIA CATERINA 13	1	2.500.000	Rusak Berat
89	Lemari Besi/Metal	1	2.445.000	VIP / V 202	-	-	-
90	Filing Cabinet Besi	5	9.760.000	SUPER VIP	-	-	-
91	Brandkas	1	10.995.000	SAFEGUARD /SP 07	1	10.995.000	Rusak Berat
92	Lemari Kaca	1	3.500.000	Etalase Kaca Logistik Bencana			
93	White Board	2	2.000.000		2	2.000.000	Rusak Berat
94	Alat Kantor Lainnya	1	1.944.000	ALINCO / UPS	1	1.944.000	Rusak Berat
95	Meja Rapat	1	10.600.000		1	10.600.000	Rusak Berat
96	Kursi Rapat	6	5.832.000	SEAT FUTURA	-	-	-
97	Kursi Rapat	1	1.468.000	SEAT FUTURA	-	-	-
98	Megaphone	6	6.048.000	TW-ZW 3200 /	-	-	-
99	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	3.900.000	-	-	-	-
100	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	20.000.000	-	-	-	-
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	13.000.000	-	-	-	-
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.850.000	CASSANOVA 805 HDT	/	-	-
103	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	10.250.000	GRAND F / GC 77 AR	-	-	-
104	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	6.174.000	-	-	-	-
105	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	2.700.000	TANAKA (Kabel antena orari TAGANA)	-	-	-
106	Pesawat Telephone	1	756.000	FAVORITE / FT 888 LMD	1	756.000	Rusak Berat
107	Handy Talky (HT)	5	9.846.000	Olinca	-	-	-
108	Handy Talky (HT)	3	8.637.000	Alinco	-	-	-
109	Wireless Amplifier	1	9.340.250	TOA	-	-	-
110	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	6.900.000	Tali statik evakuasi gulung (200 Meter)	1	-	-
111	Komputer Jaringan lainnya	1	12.000.000	Acer Aspire	1	12.000.000	Rusak Berat
112	Lap Top	2	24.750.000	TOSHIBA	2	24.750.000	Rusak Berat
113	Station Wagon	1	620.675.000	MITSUBISHI STRADA / CR 208DCGLX	-	-	-
114	Alat Kantor Lainnya	1	2.850.000	Mesin Potong Rumput TMP	1	2.850.000	Rusak Berat
115	Alat Dapur lainnya	1	4.790.000	Alat TTG	1	4.790.000	Rusak Berat
116	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	950.000		1	950.000	Rusak Berat
117	Handy Talky (HT)	1	1.737.500	Kenwood	-	-	-
118	Handy Talky (HT)	1	1.925.000	Icom	-	-	-
119	Facsimile	1	1.500.000	Panasonic	1	1.500.000	Rusak Berat
120	Komputer Jaringan lainnya	1	9.900.000	HP Pavilion	1	9.900.000	Rusak Berat
121	Komputer Jaringan lainnya	1	9.350.000	Acer	1	9.350.000	Rusak Berat
122	Komputer Jaringan lainnya	1	9.350.000	Acer	1	9.350.000	Rusak Berat
123	P.C Unit	1	9.350.000	HP Pavilion	1	9.350.000	Rusak Berat
124	Lap Top	1	3.680.000	AXIOO	1	3.680.000	Rusak Berat
125	Printer (Peralatan Komputer)	1	2.750.000	ACER	1	2.750.000	Rusak Berat
126	Printer (Peralatan Komputer)	1	2.750.000	CANON/LBP 3250	1	2.750.000	Rusak Berat
127	Station Wagon	1	173.500.000	Toyota Kijang Inova	-	-	-
128	Lemari Besi/Metal	3	9.000.000	Lion	-	-	-
129	Lemari Kayu	10	27.120.000		-	-	-
130	Filing Cabinet Besi	5	13.750.000	Lion	-	-	-
131	Papan Visual/Papan Nama	2	6.400.000	Papan DUK, Bezzeting dan Rumah Singgah	1	6.400.000	Rusak Berat
132	White Board	2	4.800.000	-	1	4.800.000	Rusak Berat
133	Alat Kantor Lainnya	4	8.700.000	ICA	1	8.700.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
134	Sofa	1	8.000.000	KTM Maribet	-	-	-
135	Wireless	1	3.100.000	Western Union	1	3.100.000	Rusak Berat
136	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	13.000.000	Horse Metal	-	-	-
137	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	18.150.000	Horse Metal	-	-	-
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	17.750.000	Chairman	-	-	-
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	11.250.000	Fanthoni	-	-	-
140	peralatan lainnya (dst) studio audio	1	2.900.000	Sony	1	2.900.000	Rusak Berat
141	Alat Khusus Keamanan Lainnya	3	7.350.000	Tabung Pemadam Api	-	-	-
142	Lap Top	1	13.800.000	Sony Vaio	1	13.800.000	Rusak Berat
143	Note Book	2	27.500.000	Sony Vaio	2	27.500.000	Rusak Berat
144	Note Book	1	3.680.000	Axioo	1	3.680.000	Rusak Berat
145	Hard Disk	1	950.000	Samsung	1	950.000	Rusak Berat
146	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	1	12.821.800	Rusak Berat
147	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
148	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
149	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
150	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
151	Perkakas Bangku Kerja	1	7.000.000	Alat TTG	1	7.000.000	Rusak Berat
152	Filing Cabinet Besi	3	7.050.000	Mustang	-	-	-
153	Mesin Absensi	1	6.094.000	Secure	1	6.094.000	Rusak Berat
154	Mesin Absensi	2	11.914.000	Secure	1	11.914.000	Rusak Berat
155	Papan Nama Instansi	1	3.000.000	Papan nama rumah singgah	1	3.000.000	Rusak Berat
156	Alat Kantor Lainnya	1	8.400.000	Multi Equipment	1	8.400.000	Rusak Berat
157	Meja Rapat	6	9.300.000	Grand Furniture	-	-	-
158	Meja 1/2 Biro	13	22.425.000		-	-	-
159	Kursi Putar	13	18.070.000	Fanthoni	-	-	-
160	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1.800.000	Sharp	-	-	-
161	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	3	3.540.000	Chairman/80LB	-	-	-
162	peralatan lainnya (dst) studio audio	1	9.000.000	Canon	1	9.000.000	Rusak Berat
163	Publik Address (Lapangan)	1	11.770.000	Sunway	1	11.770.000	Rusak Berat
164	Komputer Jaringan lainnya	2	13.600.000	HP	1	13.600.000	Rusak Berat
165	Komputer Jaringan lainnya	2	16.060.000	HP/Pavilion	1	16.060.000	Rusak Berat
166	Komputer Jaringan lainnya	1	8.030.000	HP/Pavilion	-	-	-
167	P.C Unit	4	48.000.000	Acer Aspire/M 3970	1	48.000.000	Rusak Berat
168	P.C Unit	2	11.800.000	Acer Aspire/M 1930	1	11.800.000	Rusak Berat
169	Lap Top	1	6.650.000	Toshiba	1	6.650.000	Rusak Berat
170	Lap Top	1	6.650.000	Toshiba	1	6.650.000	Rusak Berat
171	Monitor	1	2.950.000	LG/M2241	1	2.950.000	Rusak Berat
172	Printer (Peralatan Komputer)	1	2.400.000	Epson/L200	1	2.400.000	Rusak Berat
173	Printer (Peralatan Komputer)	1	1.380.000	HP Deskjet 1000	1	1.380.000	Rusak Berat
174	Printer (Peralatan Komputer)	2	5.000.000	Brother/MF C1430W	1	5.000.000	Rusak Berat
175	Printer (Peralatan Komputer)	1	2.800.000	HP/k7000	1	2.800.000	Rusak Berat
176	Lemari Kayu	1	1.800.000		-	-	-
177	Papan Visual/Papan Nama	1	13.000.000		1	13.000.000	Rusak Berat
178	Papan Nama Instansi	1	1.650.000		1	1.650.000	Rusak Berat
179	Tempat Tidur Kayu	1	2.750.000		-	-	-
180	Televisi	1	5.600.000	Samsung	1	5.600.000	Rusak Berat
181	Sound System	1	6.060.000	BMB Original	-	-	-
182	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.300.000	Matrix	-	-	-
183	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.600.000	Horse Metal	3	7.600.000	Rusak Berat
184	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.600.000	Expo	3	7.600.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
185	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	12.000.000	Chairman	-	-	-
186	Komputer Jaringan Lainnya	2	14.700.000	HP	2	14.700.000	Rusak Berat
187	Lap Top	2	14.400.000	Toshiba	2	14.400.000	Rusak Berat
188	Lap Top	1	4.150.000	Acer	1	4.150.000	Rusak Berat
189	Lap Top	1	4.150.000	Acer	1	4.150.000	Rusak Berat
190	Monitor	1	1.400.000	Samsung	1	1.400.000	Rusak Berat
191	Printer (Peralatan Komputer)	1	1.770.000	Canon/MP 237	1	1.770.000	Rusak Berat
192	Printer (Peralatan Komputer)	3	3.210.000	Canon Pixma MP 287	3	3.210.000	Rusak Berat
193	Station Wagon	1	255.623.330	Toyota Inova	-	-	-
194	Micro Bus ( Penumpang S/D 29 Orang )	15	347.860.000	Bus Pengantar Akseptor	-	-	-
195	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
196	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
197	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
198	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
199	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
200	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
201	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
202	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
203	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
204	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
205	Sepeda Motor	1	14.469.350	Honda Vario/CW	-	-	-
206	Sepeda Motor	1	14.469.350	Honda Vario/CW	-	-	-
207	Lemari Besi/Metal	2	6.550.000	-	-	-	-
208	Lemari kayu	4	10.400.000	-	-	-	-
209	Rak Besi	1	17.388.000	Rak penyimpanan barang logistik bencana	-	-	-
210	Papan Nama Instansi	1	3.300.000	Papan Nama MAKO TAGANA	-	-	-
211	Papan Pengumuman	2	7.500.000	Papan pengumuman TMP	-	-	-
212	Alat Kantor Lainnya	2	9.000.000	ICA	2	9.000.000	Rusak Berat
213	Alat Kantor Lainnya	2	5.800.000	ICA	2	5.800.000	Rusak Berat
214	Meja Rapat	2	4.150.000	-	-	-	-
215	Tempat Tidur Kayu	1	3.500.000	Tempat tidur MAKO TAGANA	-	-	-
216	Tabung Gas	4	3.200.000	-	-	-	-
217	Alat Dapur lainnya	2	1.500.000	Permadani	-	-	-
218	Televisi	1	3.500.000	LG	1	3.500.000	Rusak Berat
219	Televisi	1	5.000.000	Panasonic	1	5.000.000	Rusak Berat
220	Sound System	1	5.580.000	BMB Original	1	5.580.000	Rusak Berat
221	Mimbar/Podium	1	6.750.000	-	-	-	-
222	Gordyn/Kray	1	14.974.000	LBK	-	-	-
223	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.300.000	Matrix	-	-	-
224	Audio Amplifire	1	24.500.000	BMG	-	-	-
225	Tripod Camera	1	7.120.000	NIKON	-	-	-
226	Handy Talky (HT)	1	2.400.000	Kenwood	-	-	-
227	Handy Talky (HT)	1	2.400.000	Kenwood	-	-	-
228	Handy Talky (HT)	1	2.500.000	AICOM	-	-	-
229	Wireless Amplifier	1	8.600.000	TOA	-	-	-
230	Komputer Jaringan Lainnya	2	17.785.000	Dell	-	-	-
231	Komputer Jaringan Lainnya	2	16.000.000	HP Intel core i3	-	-	-
232	Komputer Jaringan Lainnya	1	7.475.000	HP Pavilion	1	7.475.000	Rusak Berat
233	Lap Top	2	15.000.000	Dell	-	-	-
234	Note Book	1	20.000.000	Macbook Apple	1	20.000.000	Rusak Berat
235	Station Wagon	1	190.000.000	Daihatsu Xenia	-	-	-
236	Lemari Kayu	8	17.900.000	-	-	-	-
237	Rak Besi	1	22.655.000	Rak Penyimpanan Logistik Bencana	-	-	-
238	Rak Besi	1	20.800.000	Rak Penyimpanan Logistik Bencana	-	-	-
239	Papan Nama Instansi	1	3.560.000	Papan Nama LBK	-	-	-
240	Alat Kantor Lainnya	1	1.500.000	Vandel PKK	-	-	-
241	Alat Kantor Lainnya	1	2.800.000	Tanaka	1	2.800.000	Rusak Berat
242	Meja Rapat	4	8.200.000	-	4	8.200.000	Rusak Berat
243	Meja Panjang	16	12.320.000	Dikerahkan ke Kelurahan	16	12.320.000	Dikerahkan ke Kelurahan

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan	
		Unit	Rp.		Unit	Rp.		
244	Kursi Tamu	2	9.700.000	-	-	-	-	
245	Alat Dapur lainnya	3	4.500.000	-	3	4.500.000	Rusak Berat	
246	Camera Video	1	4.000.000	Nikon Coolpix P530	1	4.000.000	Rusak Berat	
247	Camera Video	1	2.139.000	Canon S 60 D Kit 2	1	2.139.000	Rusak Berat	
248	Camera Video	1	3.600.000	Camera Digital Sony	1	3.600.000	Rusak Berat	
249	Gordyn/Kray	1	7.500.000	Gorden gudang logistik bencana	-	-	-	
250	Tripod Camera	1	900.000	Samura pro	-	-	-	
251	Handy Talky (HT)	9	22.920.000	Icom V88	-	-	-	
252	Facsimile	1	1.842.500	Panasonic	1	1.842.500	Rusak Berat	
253	Facsimile	1	4.025.000	Brother J5910	1	4.025.000	Rusak Berat	
254	Komputer Jaringan lainnya	1	9.300.000	Asus / PKH	-	-	-	
255	Lap Top	2	21.500.000	Lenovo	2	21.500.000	Rusak Berat	
256	Note Book	1	11.000.000	Asus / PKH	-	-	-	
257	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	1	2.450.000	Brother PKH	-	-	
258	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	1	2.850.000	Epson/L200	1	2.850.000	Rusak Berat
259	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	1	6.000.000	Brother	1	6.000.000	Rusak Berat
260	Station Wagon	1	350.990.000	Mobil Box Alokon	-	-	-	
261	Lemari Kayu	1	2.800.000	-	-	-	-	
262	Papan Nama Instansi	1	5.288.000	-	-	-	-	
263	Alat Kantor Lainnya	1	6.200.000	-	-	-	-	
264	Kursi Tamu	1	12.800.000	-	-	-	-	
265	Kursi Putar	1	4.000.000	-	-	-	-	
266	Karpet	1	2.500.000	Rahman	-	-	-	
267	Karpet	1	2.500.000	Rahman	-	-	-	
268	peralatan studio audio	dst	1	6.500.000	LG	-	-	
269	Telephone Mobile	7	42.000.000	Samsung	3	18.000.000	Rusak Berat	
270	Telephone Mobile	1	6.000.000	Samsung	1	6.000.000	Rusak Berat	
271	Handy Talky (HT)	9	22.600.000	Icom/V88	-	-	-	
272	P.C Unit	1	8.190.000	HP	1	8.190.000	Rusak Berat	
273	Lap Top	1	8.449.300	HP	1	8.449.300	Rusak Berat	
274	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	3	7.697.700	Epson/L220			
275	Exicitor Kecil	1	32.450.000	Fisik Barang Tidak Jelas	1	32.450.000	Fisik Barang Tidak Jelas	
276	Lemari Kayu	1	1.870.000	-	-	-	-	
277	Lemari Kayu	1	1.870.000	-	-	-	-	
278	Rak Kayu	4	5.720.000	-	-	-	-	
279	Mesin Absensi	1	3.817.000	Fingerspot	1	3.817.000	Rusak Berat	
280	Papan Tulis	2	1.980.000	-	2	1.980.000	Rusak Berat	
281	Meja Rapat	2	3.190.000	-	-	-	-	
282	Sofa	2	19.800.000	-	-	-	-	
283	Ac Window	2	7.760.400	Sharp	-	-	-	
284	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	16	26.400.000	Grand Furniture	-	-	-	
285	Kursi kerja pegawai non struktural	16	20.680.000	Chairman	-	-	-	
286	Layar Film/Projector	2	31.500.000	BenQ	2	31.500.000	Rusak Berat	
287	P.C Unit	2	23.800.000	Lenovo	-	-	-	
288	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	2	9.000.000	Epson	-	-	
289	Mobil Unit Penerangan Darat	1	745.808.350	Hilux	-	-	-	
290	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	23.805.000	Alat Komunikasi Radio TAGANA	-	-	-	
291	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	33.900.000	Alat Perlindungan TAGANA	-	-	-	
292	Alat Keamanan Lainnya	10	2.492.600	HIKVISION	-	-	-	
293	Mini Komputer	1	15.950.000	Lenovo	-	-	-	
294	Komputer Jaringan Lainnya	3	29.850.000	Lenovo	-	-	-	
295	Komputer Jaringan Lainnya	2	25.300.000	Lenovo	-	-	-	
296	Komputer Jaringan Lainnya	2	62.677.000	GenRe Kit	-	-	-	
297	Lap Top	1	6.875.000	HP	-	-	-	
298	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	1	3.100.000	Epson	-	-	
299	Printer (Peralatan Komputer)	Personal	3	10.000.000	Epson/L360	-	-	

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
300	Printer (Peralatan Komputer)	2	12.600.000	Epson	-	-	-
301	Tenda	3	21.890.000	Tenda	-	-	-
302	Tenda	2	9.570.000	Trap Tenda	-	-	-
303	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
304	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
305	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
306	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
307	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
308	Karpet	2	16.250.000	Kasmir 8232 VK	-	-	-
309	peralatan lainnya (dst)	studio	audio	1	29.761.500	BMB/DA-2000 Pro	-
310	peralatan lainnya (dst)	studio	audio	1	20.000.000	Yamaha PSR 5975	-
311	P.C Unit			3	29.937.750	Lenovo/IP 330	-
312	Printer (Peralatan Komputer)			3	4.448.850	Canon MP287	-
313	Mini Bus ( Penumpang Orang Kebawah )	14	1	271.700.000	Luxio/Molin	-	-
314	Lemari Besi/Metal			1	13.198.500	-	-
315	Rak Besi			1	1.248.500	-	-
316	Rak Besi			3	3.745.500	-	-
317	Rak Kayu			1	4.675.000	-	-
318	Rak Kayu			1	4.675.000	-	-
319	Papan Visual/Papan Nama			1	8.500.000	Papan Nama Rumah Healing	-
320	Meja Rapat			1	5.940.000	-	-
321	Meja Rapat			1	5.940.000	-	-
322	Tempat Tidur Besi			1	2.695.000	-	-
323	Meja 1/2 Biro			1	2.871.000	-	-
324	Meja 1/2 Biro			2	574.000	-	-
325	Meja 1/2 Biro			1	2.871.000	-	-
326	kursi Tamu			1	7.425.000	-	-
327	Kursi Putar			1	1.386.000	-	-
328	Kursi Putar			1	4.455.000	-	-
329	Kursi Putar			4	8.613.000	-	-
330	Sofa			1	7.800.000	Sofa Sekretariat DWP Kota	-
331	Lemari Es			1	3.080.000	Sharp	-
332	AC. Split			1	29.969.500	Daikin	-
333	Kompor Gas (Alat Dapur)			1	1.595.000	Rinai	-
334	Televisi			1	10.000.000	Panasonic	-
335	Mesin Jahit			1	2.000.000	Singer	-
336	Timbangan Barang			1	2.150.000	-	-
337	Dispenser			1	1.925.000	Sharp	-
338	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis			1	2.400.000	DWP Kota	-
339	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis			1	6.315.000	-	-
340	P.C Unit			1	12.599.950	Lenovo	-
341	P.C Unit			1	7.369.500	Lenovo (DWP Kota)	-
342	Lap Top			2	25.999.750	Lenovo	-
343	Lap Top			3	40.499.250	Lenovo	-
344	Printer (Peralatan Komputer)			2	6.999.550	Epson	-
345	Printer (Peralatan Komputer)			1	850.000	Canon (DWP Kota)	-
346	Sepeda Motor			1	25.793.400	Yamaha BSD-I A/T	-
347	Lemari Kayu			2	11.880.000	-	-
348	Kursi Tamu			2	20.680.000	-	-
349	Gynecological Examining Table			3	31.500.000	Obgyn Table	-
350	P.C Unit			1	18.390.000	Lenovo	-
351	Lap Top			2	40.000.000	HP	-
352	Lap Top			1	14.370.000	Lenovo	-
353	Lap Top			1	21.000.000	Asus	-
354	Printer (Peralatan Komputer)			1	5.390.000	Epson L5190	-
355	Printer (Peralatan Komputer)			2	9.000.000	Epson L5190	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
356	Printer (Peralatan Komputer)	1	2.700.000	Epson L320	-	-	-
357	Accs Point	1	2.500.000	Ubiquiti	-	-	-
358	Lori Dorong	1	885.000	-	-	-	-
359	Lemari Besi/Metal	1	2.850.000	-	-	-	-
360	Lemari Kayu	1	3.410.000	-	-	-	-
361	Rak Besi	2	2.000.000	-	-	-	-
362	Lemari Kaca	1	3.895.000	-	-	-	-
363	Meja 1/2 Biro	1	3.200.000	-	-	-	-
364	Kursi Putar	1	1.730.000	-	-	-	-
365	Loudspeaker	1	2.750.000	-	-	-	-
366	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1.600.000	Racun Api	-	-	-
367	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
368	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
369	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
370	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
371	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
372	Filing Cabinet Besi	2	5.974.000	Brother 4 laci	-	-	-
373	Meja 1/2 Biro	3	4.650.000	Orbitrend	-	-	-
374	Kursi Putar	3	5.400.000	Chitose	-	-	-
375	P.C Unit	2	34.000.000	Axioo/Pro L5	-	-	-
376	P.C Unit	2	22.600.000	Axioo/One Pro H6	-	-	-
377	P.C Unit	1	17.800.000	Axioo	-	-	-
378	P.C Unit	2	35.400.000	Axioo	-	-	-
379	P.C Unit	2	20.400.000	Axioo/One Pro L1	-	-	-
380	P.C Unit	1	17.250.000	Asus AID/Core i7	-	-	-
381	Lap Top	1	17.800.000	Axioo	-	-	-
382	Lap Top	2	20.646.000	Axioo	-	-	-
383	Lap Top	1	11.150.000	Advan/S5-85S	-	-	-
384	Lap Top	1	17.500.000	Acer Travelmate/P214 Core i7	-	-	-
385	Lap Top	1	14.000.000	Acer Travelmate/P214 Core i3	-	-	-
386	Printer (Peralatan Komputer)	2	10.000.000	Epson/L5290	-	-	-
387	Printer (Peralatan Komputer)	2	6.600.000	Epson/L3250	-	-	-
388	Printer (Peralatan Komputer)	2	10.500.000	Epson/L5290	-	-	-
389	Printer (Peralatan Komputer)	1	3.200.000	Epson/L3250	-	-	-
390	Printer (Peralatan Komputer)	3	9.600.000	Epson/L3250	-	-	-

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPAA Tahun 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Renstra Perubahan</b>																					
1	Perentase PPKS yang tertangani				36	55,00	0,60	0,65	80,0	82,8	79,72	0,70	0,92	92	230	145	116	142	115	Pendataan PPKS setiap bulan data akan selalu berubah sesuai dengan keadaan PPKS di lapangan . Data PPKS saat ini dilaporkan adalah keadaan bulan Desember yang telah di verifikasi.Pemberian bantuan kepada PPKS akan dilaksanakan sesuai data bulan sebelumnya. sehingga ada PPKS yang belum tertangani. Jumlah PPKS pada tahun 2024 ini meningkat jumlahnya dikarenakan adanya bencana alam yang terjadi pada tahun 2024	Penduduk yang termasuk data PPKS keadaan bulan Desember 2024 ini yang belum tertangani akan di prioritaskan untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2025
2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				90,0	90,00	90,00	90,00	100	90,0	90,00	0,90	90,00	100	100	100	100	100	100	Masih ada Lembaga Sosial yang tidak aktif melaksanakan kegiatan	Adanya pembinaan yang dilakukan setiap 4 kali setahun oleh tim kota yang terdiri dari PKK Kota, Karang Taruna Kota, DPD LPM Kota serta partisipasi LPM yang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
																					cukup tinggi untuk melakukan kegiatan.
3	Tingkat capaian Kota Layak Anak				madya	madya	Nindya	Nindya	Utama	madya	madya	Nindya	Nindya	-	100	100	100	100	-	Hasil Penilaian propinsi 916,05 dari 1000 nilai maksimal (Utama) hasil penilaian KLA di umumkan pada Tahun 2025	Adanya komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA di Kota Padang Panjang
4	Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)				-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	-	Pratama	Pratama	Pratama	-	-	100	100	100	-	Hasil penilaian sementara 939,67 dari 1000 nilai maksimal ( Prediket Madya). penilaian APE saat ini dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2004 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian APE yang hasilnya diprediksi pada tahun 2025	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dan adanya tim kerja yang mendukung kesetaraan gender baik dari kelembagaan masyarakat maupun instansi pemerintah yang terkait.
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga				2,70	2,30	2,25	2,20	2,35	2,70	2,60	2,40	2,51	2,35	100	113	107	114	100	. Hasil Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk KOTA Padang Panjang Tahun	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2024 - 2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
																				2024 ini akan di dapatkan hasilnya pada bulan Juli 2025 oleh BPS. Untuk meningkatkan IDG, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan ini melalui kebijakan yang inklusif, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan kesetaraan gender	adaalih sebanyak 4 kursi dari 20 kursi yang ada di DPRD atau sekitar 20 %.
6	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran				-	-	50,00	100	70	-	50,91	88,00	74	-	-	102	88	106	Masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang.	Melaksanakan peningkatan kapasitas Kader dan PLKB melalui pelatihan dan sosialisasi serta dengan penambahan tenaga PLKB.	

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menyusun Renstra. Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Strategi penguatan (repositori) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ke depan adalah:

1. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender
2. Meningkatnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
4. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting
5. Meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatkan akses layanan sosial bagi PPKS

Factor penghambat untuk mencapai indicator tujuan dan sasaran strategis serta indicator program masih ditemukan beberapa kendala permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kemiskinan serta Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini diantaranya ditandai oleh:
  - a. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - b. Masih adanya fakir miskin yang belum tertangani karena bantuan ekonomi produktif terbatas
  - c. Belum adanya data kemiskinan yang akurat dan up to date dan penanganan yang komprehensif
  - d. Belum tersedianya layanan rehabilitasi sosial berkelanjutan di daerah.
  - e. Belum optimalnya peran serta/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Belum optimalnya pembangunan responsive gender di Kota Padang Panjang
  - a. Belum optimalnya kinerja kelembagaan Pengarus Utamaan Gender

- b. Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan parlemen/DPRD
  - c. Masih minimnya sarana dan parana public yang responsive gender dan ramah anak
  - d. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
  - e. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama korbanya adalah anak dan perempuan
- 3. Belum terciptanya Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak
  - a. Minimnya ketersediaan ruang kreatifitas anak sebagai sarana pemenuhan hak anak dalam bermain dan berkreatifitas.
  - b. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman terhadap anak dan masih adanya penelantaran anak
  - c. Masih terbatasnya pengembangan Sekolah Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak serta pusat pelayanan ramah anak seperti Puskesmas, perkantoran dil
- 4. Belum Optimalnya upaya-upaya pengendalian Penduduk dan kurangnya kesadaran untuk berkeluarga berencana hal ini ditandai oleh
  - a. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi karena adanya keluarga dengan anak yang banyak lebih dua orang
  - b. Masih tingginya Unmet need yaitu dimana keinginan pasangan usia subur terhadap satu jenis kontrasepsi tidak tersedia sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan alat atau methoda kontrasepsi
  - c. Masih adanya pernikahan dibawah umur terutama wanita yang dibawah usia 20 tahun dan adanya keluarga yang terlalu cepat menikah, terlalu muda punya anak, terlalu rapat punya anak dan terlalu banyak anak dikenal dengan istilah 4 T
  - d. Masih Tingginya angka Prevalensi Stunting di Kota Padang Panjang
  - e. Adanya bayi dibawah dua tahun (Baduta) yang mengalami Kekurangan Energi Kronis karena kondisi ekonomi keluarga miskin
  - f. Masih terdapatnya ibu hamil yang Kekurangan Energi Potein

- g. Pola asuh anak Baduta dan Balita yang salah serta kurangnya perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak.

Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi tersebut maka usaha – usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan up date data setiap bulan dan Penduduk yang termasuk data PPKS
2. Meningkatkan kualitas SDM/ personil baik dalam kualitas maupun kuantitas serta memanfaatkan SDM yang ada
3. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana serta melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisa si
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.927.014.380	5.927.014.380	5.646.568.200	5.664.597.611	Rp6.763.481.066	5.728.406.269	5.728.406.269	5.542.336.135	5.658.564.527	Rp6.707.350.978	0,966	0,966	0,982	0,999	0,992		
Program Pemberdayaan Sosial	1.336.152.550	1.336.152.550	1.729.778.350	1.380.800.150	Rp1.366.916.000	1.302.599.560	1.302.599.560	1.719.581.615	1.430.303.173	Rp1.363.089.575	0,975	0,975	0,994	1.036	0,997	19,29%	19,82%
Program Rehabilitasi Sosial	991.854.750	991.854.750	1.359.445.000	712.807.656	Rp828.488.000	816.395.888	816.395.888	1.252.428.715	446.875.900	Rp800.960.807	0,823	0,823	0,921	0,627	0,967	10,06%	-0,25%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	114.613.100	114.613.100	5.391.647.800	251.599.450	Rp488.331.100	114.525.400	114.525.400	3.624.697.232	216.694.915	Rp463.563.903	0,999	0,999	0,672	0,861	0,949	-359,32%	264,52%
Program Penanganan Bencana	211.436.200	211.436.200	172.388.000	79.343.319	Rp182.809.351	160.035.819	160.035.819	168.535.268	73.597.600	Rp165.138.000	0,757	0,757	0,978	0,928	0,903	3,34%	6,30%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	47.383.000	47.383.000	21.250.000	21.250.000	Rp24.590.000	43.146.530	43.146.530	20.846.775	18.765.000	Rp24.542.000	0,911	0,911	0,981	0,883	0,998	-1,88%	1,10%
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	186.029.900	186.029.900	199.999.750	225.220.000	Rp171.273.750	15.572.200	15.572.200	198.523.388	185.296.955	Rp161.100.162	0,084	0,084	0,993	0,823	0,941	17,34%	34,00%
Program Perlindungan Perempuan	18.240.000	18.240.000	22.500.000	193.832.000	Rp367.468.450	18.093.650	18.093.650	22.349.250	95.040.450	Rp262.779.926	0,992	0,992	0,993	0,490	0,715	50,92%	51,87%
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	176.014.000	176.014.000	207.829.650	120.620.000	Rp157.368.600	174.630.318	174.630.318	205.691.647	49.873.300	Rp141.884.885	0,992	0,992	0,990	0,413	0,902	13,27%	-26,50%
Program Perlindungan Khusus Anak	22.497.000	22.497.000	30.150.000	441.335.000	Rp453.150.400	20.038.550	20.038.550	29.519.300	228.578.761	Rp257.745.387	0,891	0,891	0,979	0,518	0,569	44,23%	46,10%
Program Pengendalian Penduduk	905.516.250	905.516.250	135.464.500	151.124.550	Rp92.995.100	901.928.750	901.928.750	120.960.348	76.865.915	Rp86.664.235	0,996	0,996	0,893	0,509	0,932	-104,12%	-118,34%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	955.801.000	955.801.000	1.074.614.200	1.222.858.000	Rp1.482.074.000	611.253.243	611.253.243	864.653.842	917.557.532	Rp1.171.506.159	0,640	0,640	0,805	0,750	0,790	28,13%	31,35%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	167.977.700	167.977.700	1.398.058.650	1.301.354.700	Rp1.069.680.000	163.027.850	163.027.850	1.302.754.482	1.111.523.067	Rp1.018.190.811	0,971	0,971	0,932	0,854	0,952	31,78%	32,22%

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Interpretasi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun-tahun dengan Rasio Realisasi terhadap Anggaran yang Baik Tahun-tahun di mana rasio realisasi terhadap anggaran mendekati atau melebihi 90% bisa dikategorikan baik. Ini menunjukkan bahwa dana yang dianggarkan berhasil dimanfaatkan secara optimal. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai rencana, serta adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan:

Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja ini antara lain:

- Prosedur/Mekanisme:  
Mekanisme pencairan dana yang terlalu birokratis, lambatnya proses administrasi, serta perubahan regulasi mendadak bisa memperlambat realisasi anggaran.
- Jumlah dan Kualitas Personil (Sumber Daya Manusia):  
Kekurangan tenaga teknis, rendahnya kompetensi, kurangnya pelatihan, atau tingginya tingkat rotasi pegawai bisa berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan program.
- Progres Pelaksanaan Program/Kegiatan:  
Program yang tidak direncanakan dengan baik, keterlambatan tender/pengadaan, atau perubahan kebutuhan lapangan bisa menyebabkan realisasi anggaran menjadi tidak optimal.
- Faktor Eksternal:  
Termasuk perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah, bencana alam, atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berubah cepat juga bisa mempengaruhi realisasi.
- Manajemen dan Monitoring Evaluasi:  
Kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala mengakibatkan keterlambatan identifikasi masalah dan pengambilan tindakan korektif.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 2.4**  
**Kelompok Sasaran Layanan**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Kelompok rentan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat Pengembangan Lembaga Sosial	Lembaga sosial
2	Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Rehabilitas sosial Layanan Perlindungan sosial Layanan Jaminan Sosial Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang disabilitas, Keluarga miskin dan rentan, bantuan sosial kebencanaan Pendataan, verifikasi, dan validasi data kelompok sasaran pelayanan sosial
3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan Perlindungan anak dan peningkatan partisipasi anak	Perempuan korban kekerasan Anak korban kekerasan
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas data kependudukan Bina Ketahanan remaja	Pasangan Usia Subur Remaja dan generasi muda Tenaga lini lapangan PLKB/PKB

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan mengatasi permasalahan sosial. Upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

## 2.1.5 Mitra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemberdayaan Kelompok rentan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat Pengembangan Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	LSM, CSR perusahaan, Forum Lembaga Sosial	Dukungan komunitas lokal, kolaborasi multipihak	Minimnya kapasitas lembaga keterbatasan sosial, dana operasional
2	Layanan Rehabilitas sosial Layanan Perlindungan sosial Layanan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit	Regulasi dan SOP yang kuat, sinergi lintas sektor	Stigma sosial terhadap penerima manfaat, keterbatasan SDM profesional rehabilitasi				
3	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan Perlindungan anak dan peningkatan partisipasi anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Lembaga perlindungan perempuan dan anak, Forum Anak, LSM Perlindungan Anak	Adanya jaringan relawan dan komunitas perempuan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perempuan
4	Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas data kependudukan Bina Ketahanan remaja	BKKBN, Dinas Dukcapil, Puskesmas, Forum GenRe,	Dukungan kebijakan nasional program KB dan GenRe	Rendahnya masayarakat, PUS dan minat remaja mengikuti program				

dalam pemberian pelayanan

Secara keseluruhan, keberhasilan layanan Dinas Sosial dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan nasional, sedangkan permasalahan umum yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas komunitas penerima layanan, serta tantangan geografis dan kultural.

#### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.5

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Kelompok rentan Pemberdayaan keluarga dan masyarakat Pengembangan Lembaga Sosial	–
2	Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Rehabilitas sosial Layanan Perlindungan sosial Layanan Jaminan Sosial	–
3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan Perlindungan anak dan peningkatan partisipasi anak	–
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas data kependudukan Bina Ketahanan remaja	–

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Pelayanan bidang sosial dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. BUMD, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan yang dapat membantu masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian daerah

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 2.7**  
**Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Sosial**  
**Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak**

No	Aspek/Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Panjang tentang Pelaksanaan Program Sinergitas Wujudkan Kota Layak Anak Kota Padang Panjang			2022			Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama untuk mewujudkan Kota Layak Anak melalui kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembinaan keluarga	Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung
2	Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Penerima Wajib Lapor IPWL Generasi Muda bagi Penyalahgunaan Napza Kota Payakumbuh			2022			Adanya komitmen dan dukungan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan serta anggaran yang disediakan	Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana IPWL
3	Perjanjian Kerja Sama dengan Radio 98,6 FM Top tentang himbauan dan imformasi kemasyarakatan berkaitan bantuan hukum berkaitan Penyakit masyarakat di			2022			Hubungan kemitraan yang baik antara Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital membuat efektivitas radio perlu didukung oleh integrasi dengan media daring agar pesan lebih luas menjangkau masyarakat.

No	Aspek/Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Kota Padang Panjang						Anak dan Radio 98,6 FM Top	
4	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah tentang Memberikan Pendidikan dan Meningkatkan Kesadaran Perempuan tentang Hak - hak Perempuan serta Memberikan akses yang setara di Pendidikan Formal dan Meningkatkan Pengetahuan tentang isu -isu Gender			2022			Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan FKIP Universitas Muhammadiyah memiliki visi yang sejalan dalam mendorong perempuan agar memiliki kesadaran dan kapasitas yang setara di bidang pendidikan dan sosial	Keterbatasan anggaran dan sumber daya operasional
5	Perjanjian Kerja Sama dengan Radio 98,6 FM Top tentang himbauan dan imformasi kemasyarakatan berkaitan peran Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang				2023		Hubungan kemitraan yang baik antara Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Radio 98,6 FM Top	Pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital membuat efektivitas radio perlu didukung oleh integrasi dengan media daring agar pesan lebih luas menjangkau masyarakat.
6	Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Agama Kota Padang Panjang tentang Layanan Konseling/ Psikologis pada Anak Pemohon dalam Perkara Dispensasi Kawin terkait Kesiapan Mental dalam menjalani Perkawinan bagi Masyarakat Kota Padang Panjang				2023		Adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama untuk mewujudkan Kota Layak Anak	Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung

No	Aspek/Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
							melalui kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembinaan keluarga	
7	Kesepakatan bersama antara Rumah Healing Kota Padang Panjang dengan Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang				2023		Pemerintah Kota Padang Panjang mendukung keberadaan Rumah Healing sebagai lembaga layanan terpadu yang berperan dalam pemulihian sosial dan psikologis korban, serta bersinergi dengan aparat penegak hukum	Masih adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan atau pelaku anak Korban sering enggan melapor karena takut dikucilkan
8	Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang tentang Bidang Menyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas					2024	inas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan akses keadilan dan layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas	Minimnya anggaran untuk program inklusi Kegiatan pelatihan, penyediaan fasilitas bantu, dan pengadaan sarana adaptif masih terkendala pendanaan
9	Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang tentang Penyiapan Diri Remaja untuk Tumbuh dan Berkembang secara Optimal dalam Mewujudkan					2024	komitmen kuat dari kedua lembaga terhadap pembinaan remaja Baik Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Masih rendahnya kesadaran remaja terhadap pentingnya pembinaan diri Sebagian remaja kurang memahami pentingnya pengendalian diri, perencanaan masa depan, dan pola hidup sehat karena pengaruh lingkungan dan media sosial.

No	Aspek/Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Generasi Berkualitas						Anak maupun Kementerian Agama memiliki kepedulian dan program searah dalam membentuk karakter remaja yang sehat, berakhlak, dan siap menjadi generasi berkualitas.	
10	Perjanjian Kerja Sama dengan Radio 98,6 FM Top tentang Dialog Interaktif Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Raudhatul Kota Padang Panjang	2020	2021	2022	2023	2024	Petugas yang memiliki kemampuan dalam melakukan dialog dengan tema yang berbeda-beda setiap siaran sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat tentang Permasalahan Keluarga	Terbatasnya anggaran yang tersedia

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Kerja sama daerah memegang peranan krusial dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak merupakan langkah esensial untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan.

Kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengingat kompleksitas permasalahan sosial, kependudukan, serta isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab ini diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah lain, lembaga vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut dapat

berupa pertukaran data dan informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan layanan sosial terpadu, program pemberdayaan ekonomi perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas daerah, hingga kerja sama dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Melalui kerja sama yang terarah, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat integrasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Bappeda sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan sosial, pengendalian penduduk, peningkatan partisipasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui pengukuran capaian indikator-indikator tersebut, dapat diketahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya

kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta ketahanan dan kualitas keluarga di daerah.

**Tabel 2.9**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.(PPKS)	Bagaimana meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, disabilitas, dan anak terlantar?	Data PPKS belum mutakhir dan belum terintegrasi Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Koordinasi lintas sektor belum optimal
2	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana	Mengapa partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program KB masih rendah, terutama di wilayah pinggiran?	Masih adanya stigma terhadap KB Akses informasi dan pelayanan KB terbatas Kurangnya tenaga penyuluhan lapangan KB
3	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bagaimana meningkatkan efektivitas perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?	Sarana dan prasarana Kelembagaan UPTD PPA masih kurang SDM pendamping terbatas Rendahnya kesadaran dan pelaporan masyarakat terkait kasus kekerasan
4	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ekonomi produktif	Mengapa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan publik masih rendah?	Masih ada ketimpangan gender dalam akses pelatihan dan modal usaha Norma sosial dan budaya patriarkal
5	Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal	Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?	Kapasitas aparatur belum merata Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal Koordinasi antar bidang dan mitra kerja belum sinergis

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat multidimensional. Dari sisi pelayanan sosial, permasalahan utama adalah belum optimalnya jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk keluarga miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta korban kekerasan. Keterbatasan data yang akurat dan terkini tentang kelompok rentan juga menjadi hambatan dalam perencanaan intervensi yang tepat sasaran.

Pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan

keluarga dan pemanfaatan layanan Keluarga Berencana (KB), terutama di wilayah pinggiran. Selain itu, kesenjangan antar wilayah dalam hal akses dan mutu pelayanan KB masih cukup lebar.

Dalam bidang pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengambilan keputusan publik, serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan dan pendampingan berkelanjutan. Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, seperti UPTD PPA dan forum-forum PUG, juga masih perlu diperkuat dari sisi SDM, koordinasi lintas sektor, dan anggaran.

Selain itu, dari sisi tata kelola, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta kolaborasi antar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mitra kerja. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam memperluas cakupan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan perlunya penguatan sistem layanan yang terpadu, berbasis data, responsif gender, dan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

### **2.2.2 Isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya Forum Anak Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan UPTD PPPA, Lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta adanya Organisasi perempuan (PKK, Dharma Wanita, GOW) tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.	Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) belum akurat dan terintegrasi → menyebabkan ketidaklengkapan sasaran layanan.	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	Isu kesetaraan gender global yang dorongan internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender
Ketersediaan tenaga kader KB dan posyandu, dan Mitra kerja KB seperti PKK dan BKKBN	Tingginya jumlah PPKS yang belum tertangani → termasuk lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, ODGJ.	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan	Perubahan iklim dan bencana alam akan meningkatkan kerentanan kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak-anak) sehingga butuh penguatan perlindungan sosial	Ketimpangan gender yang masih tinggi	Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan termasuk pengurangan korupsi dan pengambilan keputusan yang responsif	Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)
Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan yang aktif, adanya Relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta adanya SDM yang tekait dengan Data dan jaringan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Migrasi internasional dan urbanisasi akan memengaruhi dinamika kependudukan, ketahanan keluarga, dan potensi permasalahan sosial.	Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit	Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi	Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
				Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancamankrisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting
				Peningkatan kemiskinan kerentanan berdampak pada		Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				meningkatnya PPKS yang perlu dilayani.		

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Potensi daerah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakcukup beragam, mulai dari adanya Forum Anak Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD PPPA, lembaga penyedia layanan korban kekerasan, hingga organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, dan GOW yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, terdapat tenaga kader KB dan posyandu, mitra kerja KB dari PKK maupun BKKBN, serta keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), panti asuhan, relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan SDM yang terhubung dengan data serta jaringan PPKS. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan KB.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah permasalahanari sisi isu lingkungan hidup berkelanjutan (KLHS), permasalahan ini berkaitan pada level global, regional dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: belum optimalnya upaya pembangunan dan kesetaraan gender; capaian Kota Layak Anak (KLA) yang masih perlu ditingkatkan; pelayanan kependudukan dan KB yang belum maksimal; perlunya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting; serta masih terbatasnya akses layanan sosial bagi PPKS. Dengan demikian, pemetaan potensi, permasalahan, isu KLHS, hingga isu lingkungan global, nasional, dan regional menunjukkan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih terintegrasi untuk memperkuat peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial yang inklusif

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH” dengan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NSPK RPJMD RELEVAN	SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S1.4	Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70	71	72	73	74	75	
S2.6	: Menurunnya tingkat kemiskinan daerah			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	
S4.2	: Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65	
				Angka PPKS	3.35	3.45	3.3	3	2.95	2.85	
				Indeks Kesejahteraan Sosial	66,33	67,56	68,17	69,55	70,33	72,59	
				Jumlah penduduk miskin	3060	2714	2368	2023	1671	1325	
				Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya ( PPE)	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	
				Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
				Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34
				Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,1	6,08	6,06	6,04	6,02	6
				Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	75	76	77	78	79	80
					Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.00	70.50	71,5	72	74,5	75

NSPK RPJMD RELEVAN	SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya layanan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	97,5	98	98,5	99	99,5	100	

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPP A Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJMD yang relevan dengan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama yang akan dicapai sepanjang periode 2025–2030.

Pertama, pada sasaran S1.3 yaitu meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah menargetkan peningkatan *Indeks Perlindungan Anak (IPA)* dari angka baseline 70 di tahun 2025 dan secara bertahap meningkat menjadi 75 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak serta upaya perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. IPA adalah indikator komposit yang menggambarkan sejauh mana anak memperoleh hak-haknya dalam hal hak atas lingkungan keluarga & pengasuhan yang aman Hak atas kesehatan dasar & kesejahteraan, termasuk gizi, pendidikan, dan layanan dasar Hak atas kesehatan dasar & kesejahteraan, termasuk gizi, pendidikan, dan layanan dasar Hak atas perlindungan khusus, seperti perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, perdagangan anak, perkawinan usia anak, dan diskriminasi , Hak partisipasi anak, yaitu keterlibatan anak dalam menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan sesuai usia. Semakin tinggi nilai IPA (skala 0–100), semakin baik pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah. Dikota Padang Pajang meskipun indikator IPA menunjukkan tren naik, masih berada di kisaran “sedang” dan belum mencapai level optimal (mendekati 100).

Pada sasaran S2.6: Menurunnya tingkat kemiskinan daerah Indikator *Jumlah Penduduk Miskin* digunakan untuk mengukur capaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Indikator ini mencerminkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Penurunan jumlah penduduk miskin ini diharapkan menjadi hasil dari sinergi berbagai program lintas sektor, terutama melalui peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta intervensi pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Dengan strategi yang berfokus pada penguatan data kemiskinan terpadu, pemberian

bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pengembangan usaha ekonomi produktif, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam mewujudkan tujuan menurunnya tingkat kemiskinan daerah secara berkelanjutan

*Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).* Dari baseline 66,56 di tahun 2025, ditargetkan naik tipis secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 67,06 di tahun 2030. Peningkatan ini menandakan adanya penguatan fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi pembangunan sosial. iBangga merupakan indeks gabungan yang digunakan untuk mengukur kondisi keluarga Indonesia berdasarkan tiga dimensi utama yaitu Ketentraman (kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan ketahanan ekonomi keluarga), Kemandirian (akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hunian layak), Kebahagiaan (kualitas hubungan antar anggota keluarga, keterlibatan sosial, dan partisipasi). Nilai iBangga semakin tinggi menunjukkan keluarga lebih sejahtera, harmonis, mandiri, dan berdaya. Indeks ini penting karena keluarga adalah unit terkecil yang menentukan kualitas pembangunan manusia. Di Kota Padang Panjang iBangga secara sudah menunjukkan pencapaian “cukup baik / berkembang,” dengan tren kenaikan tahunan yang positif, namun masih jauh dari kategori “baik / tangguh” (biasanya > 70).

Mengenai meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat diukur dengan beberapa indikator kunci. *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* ditargetkan meningkat dari 98,25 di tahun 2025 menjadi 98,65 di tahun 2030, mencerminkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. IPG adalah indeks yang menunjukkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek Pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), Kesehatan (angka harapan hidup), Ekonomi (pendapatan per kapita atau PDB per kapita).IPG dihitung dengan membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan.Nilai IPG = 100 → menunjukkan perempuan dan laki-laki sudah setara.Nilai IPG < 100 → ada kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Di Kota Padang Panjang IPG sudah cukup tinggi, mendekati kesetaraan (nilai mendekati 100), namun masih ada ruang perbaikan kedepannya.

Pada aspek kesejahteraan sosial, terlihat adanya target penurunan jumlah *Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* dari angka 3,34 pada tahun

2025 menjadi 2,5 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan upaya nyata dalam mengurangi kerentanan sosial melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan. Namun demikian, untuk *Indeks Kesejahteraan Sosial* masih ditetapkan stagnan di angka 66,33 sepanjang periode, yang menunjukkan perlunya strategi lebih lanjut agar indikator ini juga dapat meningkat sesuai dinamika pembangunan sosial. IKS adalah ukuran komposit yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi aspek: Kondisi ekonomi masyarakat (tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan ekonomi), Akses layanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial), Kualitas hidup sosial (partisipasi sosial, kerukunan, keamanan, dan keadilan sosial). IKS memberikan gambaran umum apakah masyarakat sudah hidup layak, aman, sehat, berpendidikan, serta terlindungi secara sosial.

Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan arah pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan sosial masyarakat dengan indikator yang terukur, target yang progresif, dan fokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

### 3.2 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sub Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka langkah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi

merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Tabel 3.2 Menyusun Strategi Berdasarkan Isu Strategi

ISU STRATEGIS	STRATEGI	LOKASI (SESUAI RTRW)
Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	ST1.4.1 : Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	ST1.4.2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	ST1.4.3 : Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)	ST1.4.4 : Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Kota Padang Panjang
	ST1.4.5 : Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya jumlah penurunan penduduk miskin	ST2.6.1 : Percepatan Penanggulangan kemiskinan	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS	ST4.2.1 : Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat	Kota Padang Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kependudukan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kompleksitas permasalahan sosial, dinamika kependudukan, ketimpangan gender, serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menuntut adanya strategi yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang masih berkaitan dengan belum optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, penanganan keluarga berisiko stunting, pembangunan dan kesetaraan gender, pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA), serta akses layanan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk menjawab isu tersebut, ditetapkan sejumlah strategi. Pertama, optimalisasi pelaksanaan program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana. Kedua, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga sebagai upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting. Ketiga, optimalisasi peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang adil dan inklusif.

Selain itu, strategi juga diarahkan pada penguatan layanan kesejahteraan keluarga dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen perlindungan sosial. Terakhir, strategi peningkatan pemberdayaan dan bantuan sosial bagi masyarakat terus diperkuat untuk memperluas akses layanan sosial khususnya bagi PPKS.

Seluruh strategi ini dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kota Padang Panjang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan penataan ruang wilayah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan strategi tersebut mampu mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat kesetaraan gender, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan strategi yang tepat dan arah kebijakan yang jelas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial, mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, serta menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan anak, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.

**Tabel 3.3**  
**Pentahapan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan Kelembagaan dan Data Gender & Anak	Perluasan Program Kesetaraan Gender & Kota Layak Anak	Integrasi Program Perlindungan Perempuan & Anak dalam Pembangunan Daerah	Akselerasi Pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan KLA	Kemandirian dan Keberlanjutan Gerakan Responsif Gender dan Ramah Anak
Pemutakhiran data GAP Gender dan Profil Anak.	Pengarusutamaan gender dalam program Perangkat Daerah.	Penanganan kekerasan berbasis gender dan anak secara terpadu.	Monitoring capaian indikator IPG dan IDG.	Penetapan sistem keberlanjutan KLA dan pengarusutamaan gender pasca RENSTRA.
Penguatan Data dan SDM Penggerak Program KB	Peningkatan Cakupan Pelayanan KB dan Edukasi Kependudukan	Integrasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Evaluasi dan Inovasi Program Ketahanan Keluarga	Kemandirian Keluarga dan Optimalisasi Bonus Demografi
Penguatan kapasitas PLKB/PKB dan kader IMP.	Pelayanan KB bergerak dan integrasi di fasilitas kesehatan.	Penguatan kelompok BKR, BKL, BKB, UPPKS.	Evaluasi hasil intervensi keluarga berisiko stunting dan kemiskinan	Integrasi capaian Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan
Review dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (RENSTRA, RENJA, PK).	Penataan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) agar lebih terukur.	Optimalisasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas	Kemandirian dan keberlanjutan kinerja dengan Persiapan penyusunan RENSTRA periode berikutnya berbasis hasil evaluasi kinerja
Penguatan Basis Data dan Kelembagaan Sosial	Perluasan Jangkauan Pelayanan Sosial	Integrasi Pelayanan dan Pemberdayaan PPKS	Akselerasi dan Replikasi Layanan Unggulan	Kemandirian Sosial dan Keberlanjutan Program
Pemutakhiran DTSEN dan data PPKS per kecamatan/kelurahan	Penjangkauan dan intervensi bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, anak terlantar)	Pelatihan kemandirian dan kewirausahaan sosial bagi PPKS	Digitalisasi layanan sosial dan sistem monitoring terpadu.	Penetapan kebijakan keberlanjutan pelayanan sosial pasca RENSTRA.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 3.4**  
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga**  
**Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>OPERASIONAL NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENTSRA</b>
S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Pelaksanaan Konseling Keluarga	Penguatan layanan konseling keluarga berbasis masyarakat
	Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM Kader KB	Peningkatan kapasitas kader KB dan tenaga penyuluhan melalui pelatihan berjenjang
	Pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk mendukung Kesertaan ber-KB	Optimalisasi sistem pendataan keluarga berbasis teknologi informasi
	Peningkatan Pengetahuan Orang tua terhadap peningkatan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Peningkatan pola pengasuhan positif dan pendidikan keluarga
	Pelaksanaan Bimbingan terhadap remaja dalam merencanakan / menyiapkan kehidupan berkeluarga	Penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan ketahanan remaja
	Peningkatan infrastruktur pelayanan keluarga	Peningkatan sarana prasarana ramah keluarga dan ramah anak
	Meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan	Penguatan partisipasi perempuan dalam kelembagaan masyarakat dan pemerintahan
	Pelaksanaan Kerjasama berbagai pihak dalam meningkatkan peran perempuan	Peningkatan sinergi stakeholder dalam pemberdayaan perempuan
	Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender	Penguatan pengetahuan serta pendidikan masyarakat dan lembaga tentang kesetaraan gender
	Peningkatan Infrastruktur layanan Perlindungan perempuan dan anak	Penguatan sarana dan prasarana UPTD PPA dan layanan rujukan berbasis perempuan dan anak
	Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak	Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak
	Pelaksanaan Kerjasama lintas sektor untuk mencegah dan menangani praktik-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak
	Penguatan Regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyusunan dan penegakan regulasi daerah terkait perlindungan perempuan dan anak

<b>OPERASIONAL NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENTSRA</b>
	Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi pendampingan bantuan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan	Melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dengan sistem DTSEN
S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Akurasi pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan	Penguatan basis data dalam penyaluran bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran
	Kerja sama lintas sektoral dalam penguatan perlindungan sosial	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kelompok rentan
	Pengembangan infrastruktur dan ruang komunitas yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas	Peningkatan sarana dan prasarana layanan sosial ramah lansia dan disabilitas
	Pengembangan program dan fasilitasi kegiatan kreativitas dan produktivitas bagi penyandang disabilitas	Peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan keterampilan bagi penyandang disabilitas
	Pengembangan program pemberdayaan bagi lansia yang relevan dan berkelanjutan	Peningkatan Pemberdayaan lansia melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan perlindungan sosial terhadap masyarakat.

Untuk sasaran meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan anak (S1.4), arah kebijakan yang ditempuh meliputi pelaksanaan konseling keluarga, peningkatan kapasitas SDM kader KB, serta optimalisasi pendataan keluarga berbasis teknologi informasi. Selain itu, dilakukan peningkatan pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan positif, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta pengembangan sarana prasarana ramah keluarga. Upaya pemberdayaan perempuan juga diperkuat melalui peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, sinergi multipihak, kampanye publik tentang kesetaraan gender, serta penguatan infrastruktur layanan perlindungan perempuan dan anak. Di sisi lain, perlindungan hukum diperkuat dengan penyusunan regulasi, monitoring dan evaluasi, serta integrasi layanan perlindungan lintas sektor.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran operasional “Menurunnya tingkat kemiskinan daerah”, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada pengelolaan dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penerapan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data dilakukan secara periodik agar data yang digunakan selalu akurat, mutakhir, dan dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat miskin di daerah. Dengan data yang valid, diharapkan intervensi kebijakan dan program sosial dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah

Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat (S4.2), arah kebijakan diarahkan pada peningkatan akurasi pemberian bantuan sosial, penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kelompok rentan. Pengembangan ruang komunitas inklusif bagi

lansia dan penyandang disabilitas juga menjadi prioritas, disertai dengan dukungan program pemberdayaan ekonomi, keterampilan, dan kreativitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, lansia didorong untuk terus berdaya melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kebijakan yang dijalankan tidak hanya mampu memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan**

<b>TUJUAN/ SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat	Meningkatkan kependudukan dan pelayanan keluarga berencana	ST1.4.1 : Optimalisasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Konseling Keluarga
			Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM Kader KB
			Pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk mendukung Kesertaan ber-KB
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	ST1.4.2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Peningkatan Pengetahuan Orang tua terhadap peningkatan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
			Pelaksanaan Bimbingan terhadap remaja dalam merencanakan / menyiapkan kehidupan berkeluarga
			Peningkatan infrastruktur pelayanan keluarga
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	ST1.4.3 : Optimalisasi Peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender	Meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan
			Pelaksanaan Kerjasama berbagai pihak dalam meningkatkan peran perempuan
			Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	ST1.4.4 : Penguatan layanan kesejahteraan keluarga Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga	Peningkatan Infrastruktur layanan Perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak
			Pelaksanaan Kerjasama lintas sektor untuk mencegah dan menangani praktik-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak
		ST1.4.5 : Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak	Penguatan Regulasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Fasilitasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak		

TUJUAN/ SASARAN	Meningkatnya layanan sosial bagi PPKS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		ST2.6.1 : Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan
		ST4.2.1 : Meningkatkan pemberdayaan dan bantuan sosial terhadap masyarakat	Akurasi pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan
			Kerja sama lintas sektoral dalam penguatan pelindungan sosial
			Pengembangan infrastruktur dan ruang komunitas yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas
			Pengembangan program dan fasilitasi kegiatan kreativitas dan produktivitas bagi penyandang disabilitas
			Pengembangan program pemberdayaan bagi lansia yang relevan dan berkelanjutan

Tujuan pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, percepatan penanganan keluarga berisiko stunting, pembangunan dan kesetaraan gender, pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan akses layanan sosial bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Strategi yang ditempuh meliputi optimalisasi pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar keluarga, optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan, penguatan layanan kesejahteraan keluarga, peningkatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta pemberdayaan sosial masyarakat. Arah kebijakan yang mendukung strategi tersebut antara lain peningkatan kapasitas SDM kader, optimalisasi pendataan keluarga, edukasi pengasuhan anak, pembinaan kesehatan reproduksi remaja, penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga pengembangan infrastruktur perlindungan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Program unggulan yang diusung antara lain *Pendampingan Keluarga Stunting*, *Pelaksanaan Sekolah Ibu*, serta penguatan pusat layanan seperti *Istana Lansia* dan *Graha Disabilitas*. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga, mempercepat penurunan angka stunting, mendorong kesetaraan gender, memperluas layanan perlindungan sosial, serta menciptakan Kota Padang Panjang yang ramah anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

**Tabel 4.1**  
**Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
S1.3 Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		<p>Meningkatnya kelembagaan sosial melalui peningkatan pengarusutamaan gender (PUG)</p> <p>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan</p> <p>Meningkatnya nilai PPE</p> <p>Meningkatnya jumlah kelompok rentan yang terlindungi secara sosial (lansia, penyandang disabilitas, anak, korban kekerasan, fakir miskin, dll).</p> <p>Meningkatnya akses masyarakat terhadap program bantuan sosial.</p> <p>Meningkatnya kemandirian dan keberfungsi sosial penerima manfaat.</p> <p>Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan penguatan perlindungan sosial secara terpadu</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG</p> <p>2. Tersedianya layanan rujukan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan</p> <p>3. Peningkatan ketersediaan data terlilah menurut jenis kelamin</p> <p>4. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG</p> <p>Jumlah penerima bantuan sosial yang terlayani</p> <p>Jumlah kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak, korban kekerasan, dll) yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.</p> <p>Jumlah pendamping sosial atau petugas layanan yang dilatih.</p> <p>Jumlah rumah aman, pusat layanan terpadu (P2TP2A), atau lembaga rujukan yang dioperasikan.</p> <p>Jumlah kegiatan penjangkauan dan asesmen terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>Jumlah masyarakat terdampak bencana sosial/ekonomi yang menerima intervensi darurat</p> <p>Meningkatnya jumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang berjalan efektif dan berkelanjutan.</p>	<p>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</p> <p>Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)</p> <p>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>Angka PPKS</p> <p>Indeks Kesejahteraan Sosial</p> <p>Jumlah penduduk miskin</p>		
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah							
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender		<p>Meningkatnya kelembagaan dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah.</p> <p>Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor.</p> <p>Meningkatnya capaian indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE).</p> <p>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender.</p>	<p>Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).</p> <p>Tersusunnya data terlilah menurut jenis kelamin dan analisis gender di lintas sektor.</p> <p>Tersusunnya kebijakan dan dokumen perencanaan responsif gender (GAP, GBS, GAD, dll).</p> <p>Terselenggaranya kampanye, sosialisasi, dan advokasi kesetaraan gender kepada masyarakat.</p>	<p>Predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya ( PPE)</p>		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
				Tersedianya OPD yang memiliki data terpilah	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya OPD yang menyusun GAP dan GBS	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		
					Jumlah dokumen hasil evaluasi PUG yang disusun	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya perempuan di partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Percentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPP yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Tersusunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KTP Dan TPP Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tesusunnya lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat	Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat/Kabupaten/Kota	Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
					Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
			tersedianya SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak		
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Tersedianya produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	Jumlah produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah lembaga layanan (seperti UPTD PPA, P2TP2A, LSM mitra) yang terlibat dalam peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota		
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam lima klas ter KLA Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan KLA. Meningkatnya partisipasi anak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Meningkatnya skor penilaian KLA dan perolehan predikat (Pratama, Madya, Nindya, Utama, KLA).	Terselenggaranya forum anak aktif dan berjengang Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan bagi anak (UPTD PPA, SAPA 129, dkk). Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi tentang KLA kepada OPD, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat. Tersedianya data terpilah anak dan sistem informasi KLA. Tersusunnya dokumen evaluasi mandiri dan pengisian indikator KLA.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terbentuknya lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
				tersusunnya kasus yang ditindak lanjuti	Percentase kasus yang ditindak lanjuti	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
					terhadap anak kewenangan kabupaten/kota		
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Percentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Terdokumentasinya anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi		Percentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjanganan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjanganan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjanganan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjanganan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Rumah Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Layanan Gelar Kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjanganan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Anak Korban Kekerasan	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Meningkatnya kesertaan masyarakat dalam program kependudukan dan KB.  Meningkatnya kesadaran dan perilaku ber-KB di masyarakat.  Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dan baru.	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang dilayani  Jumlah kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KB yang dilaksanakan  Jumlah fasilitas pelayanan KB yang berfungsi	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)    Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate /TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19 )  Rate Nett Recent Migrasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
				Tersedianya regulasi yang dihasilkan	Jumlah regulasi yang dihasilkan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya rumah dataku yang dikembangkan	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
					Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data	
		terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
					Rasio akseptor KB		
					Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)		
					Persentasi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
				terdokumentasinya Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	
				Terdokumentasinya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tedokumentasinya PKB, Kader IMP yang dibina	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
				Terlaksananya kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayana dan pembinaan Kesertaan ber KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting di kampung KB	
		Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Meningkatnya cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan terpadu	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Lansia Berdaya		
					Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja		
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Tersusuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko stunting ( Tersusuk remaja, Calon Pengantin,/Calon PUS,ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Tersusuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting ( termasuk remaja dan calon Pengantin,Calon PUS,ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)	
				Tersedianya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen perencanaan berkualitas	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader ) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	
						URUSAN SOSIAL	
			Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah		Percentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Percentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
				Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Percentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Percentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Percentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatkan Layanan sosial bagi PPKS	Meningkatnya jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sosial secara berkelanjutan.	Jumlah PPKS yang diidentifikasi, diverifikasi, dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Jumlah PPKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial (rumah singgah, pelayanan rujukan, intervensi langsung, dll).  Jumlah kegiatan penjangkauan dan asesmen PPKS oleh tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, pendamping sosial, dll).  Jumlah lembaga penyedia layanan PPKS yang dibina/dikembangkan.  Jumlah tenaga layanan sosial yang dilatih untuk menangani PPKS.	Percentase PPKS yang tertangani		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Percentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
					Percentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
				Terbentuknya lembaga sosial yang aktif	Percentase lembaga sosial yang aktif	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Menigkatnya Rehabilitas Sosial		Percentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Percentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Percentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Percentas Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Terdokumentasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaihan dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terdokumentasinya PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
		<b>Menigkatnya perlindungan dan jamianan sosial</b>			<b>Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	
					<b>Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi</b>		
					<b>Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin</b>		
					<b>Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan</b>		
				<b>Tersedianya layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</b>	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
		<b>Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana</b>			<b>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	
					<b>Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya</b>		
					<b>Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial</b>		
				<b>Terselenggaranya pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana</b>	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				<b>Terbentuknya anggota TAGANA yang dibina</b>	<b>Jumlah anggota TAGANA yang dibina</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
		<b>Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan</b>			<b>Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
				Terselenggaranya makam yang dipelihara	Jumlah makam yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta perlindungan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, sasaran RPJMD yang relevan antara lain adalah meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat.

Untuk mendukung sasaran tersebut, menetapkan tujuan yaitu meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, antara lain: meningkatnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, serta meningkatnya nilai Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) sebagai indikator keberhasilan implementasi PUG.

Outcome yang diharapkan dari upaya ini adalah meningkatnya kelembagaan dan implementasi PUG di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meningkatnya jumlah kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak, korban kekerasan, fakir miskin) yang terlindungi secara sosial, meningkatnya akses masyarakat terhadap program bantuan sosial, serta tumbuhnya kemandirian dan keberfungsian sosial penerima manfaat. Outcome lainnya juga tercermin dalam meningkatnya capaian indikator pembangunan, seperti Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender (IPG), nilai AKIP, angka PPKS, serta predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) .

Untuk mencapai outcome tersebut, diperlukan output yang jelas dan terukur. Beberapa output yang ditargetkan antara lain: peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, tersedianya layanan rujukan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, tersedianya data terpisah menurut jenis kelamin, serta terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, output juga meliputi jumlah penerima bantuan sosial yang terlayani, jumlah kelompok rentan yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial, jumlah

pendamping sosial yang dilatih, jumlah rumah aman dan pusat layanan terpadu (P2TP2A) yang berfungsi, jumlah kegiatan pendampingan PPKS, hingga jumlah masyarakat terdampak yang menerima intervensi.

Untuk menilai keberhasilan capaian outcome dan output, digunakan indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan, seperti Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender (IPG), nilai AKIP , angka PPKS, serta predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE). Indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja sekaligus sebagai instrumen evaluasi pembangunan sosial yang lebih akuntabel dan terukur.

Seluruh rangkaian tujuan, sasaran, outcome, output, dan indikator tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang dilaksanakan antara lain mencakup penguatan kelembagaan PUG, pelayanan rujukan bagi korban kekerasan, peningkatan kualitas data terpisah gender, penyediaan layanan rehabilitasi sosial, pembinaan kelembagaan perlindungan sosial, penyusunan dokumen perencanaan responsif gender, serta advokasi perlindungan perempuan dan anak. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan, serta terwujudnya perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Dengan cara ini, setiap kegiatan tidak berdiri sendiri, melainkan langsung berkontribusi pada pencapaian RPJMD dan indikator pembangunan. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagai pada tabel berikut :



**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Padang Panjang**

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangana	
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.503.761.154		11.544.437.000		10.117.121.000		10.117.121.000		10.117.121.000		10.117.121.000		10.117.121.000			
		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				-		750.660.000		750.660.000		750.660.000		#####		750.660.000		3.753.300.000			
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Pesen	15,38	15,40	-	15,42	265.000.000	15,44	265.000.000	15,46	265.000.000	15,48	265.000.000	15,50	265.000.000	15,50	1.325.000.000		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pesen	66,33	66,37	-	66,43		66,44		66,45		66,46		66,47		66,47		66,47		
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilih	OPD	23	23	-	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	75.000.000		
		Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	OPD	23	23	-	23		23		23		23		23		23		23		
		Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Lembaga/ OPD	23	23	-	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	15.000.000	23	75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Keterangan
		Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/n/Kota	PUG yang disusun																	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/n/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/n/kota	Persen	20	20	-	20	250.000.000	20	250.000.000	50	250.000.000	50	#####	50	250.000.000	50	1.250.000.000	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	organisasi Kegiatan	26	26	-	26	250.000.000	26	250.000.000	26	250.000.000	26	250.000.000	26	250.000.000	26	1.250.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasaan dan TPPO yang Mendapatkan	Persen	100	100	-	100	172.353.750	100	172.353.750	100	172.353.750	26.17	172.353.750	26.17	172.353.750	26.17	861.768.750	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Layanan Komprehensif																		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/n/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	Kasus	5	5	-	6	50.000.000	7	50.000.000	8	50.000.000	9	50.000.000	10	50.000.000	10	250.000.000	
	dak	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIP Dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/n/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	3	3		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	250.000.000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/n/Kota	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Lembaga	3	3	-	3	93.308.750	3	93.308.750	3	93.308.750	3	93.308.750	6	93.308.750	6	466.543.750	
	dak	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/n/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan	orang	5	5	-	6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			korban Tingkat Kabupaten /Kota																	
	dak	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten /Kota	orang	5	5		6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	
	dak	Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkuan Tingkat	orang	5	5		6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	
	dak	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkuan bagi Tingkat Kabupaten /Kota	orang	5	5		6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	
	dak	Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban	orang	5	5		6	28.308.750	7	28.308.750	8	28.308.750	9	28.308.750	10	28.308.750	10	141.543.750	
	dak	Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat	orang	5	5		6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Keterangan
		Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Tingkat																	
	dak	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapat kan Layanan Pengaduan atau Penjanganan tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	5		6	15.000.000	7	15.000.000	8	15.000.000		15.000.000	10	15.000.000	10	75.000.000	
		Penggunaan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat kan bimtek	orang	10	10	0	10	20000000	10	20000000	10	20000000	10	20000000	10	20000000	10	100000000	
	dak	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat kan bimtek	orang	10	10		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	100.000.000	
		Pengawalan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang	Persen Dokumen	100	100	1	100	9.045.000	100	9.045.000	100	9.045.000	100	9.045.000	100	9.045.000	100	45.225.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Keterangan
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota																	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan (seperti UPTD PPA, P2TP2A, LSM mitra) yang terlibat dalam peningkatan kapasitas SDM	lembaga	3	3	-	3	9.045.000	3	9.045.000	3	9.045.000	3	9.045.000	3	9.045.000	3	45.225.000	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK HANAK (PHAH)	Indeks Pemenuhan an Hak Anak (IPHA)	angka	64,05	64,08	-	64,1	25.000.000	64,14	25.000.000	64,18	25.000.000	64,2	25.000.000	64,24	25.000.000	64,24	125.000.000
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	Lembaga	4	4	-	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	125.000.000	
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapat advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan	Lembaga	5	5	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	125.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	n Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	-	100	288.306.250	100	288.306.250	100	288.306.250	100	#####	100	288.306.250	100	1.441.531.250	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	85,74	85,74	-	85,74		85,74		85,74		85,74		85,74		85,74		-
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	persen	100 persen	100 persen	-	100 persen	76.500.000	100 persen	76.500.000	100 persen	76.500.000	100 persen	76.500.000	100 persen	76.500.000	100 persen	382.500.000	
		koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	125.000.000	
	dak	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku	Kegiatan	1	1		1	51.500.000	1	51.500.000	1	51.500.000	1	51.500.000	1	51.500.000	1		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Keterangan
		an Kia Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kia tingkat Kab/Kota																	
		Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Orang	10	10	0	10	11000000	10	11000000	10	11000000	10	11000000	10	11000000	10	11000000	10	55000000
	dak	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	10	10	-	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	55.000.000	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	Persen	100	100	-	100	200.806.250	100	200.806.250	100	200.806.250	100	200.806.250	100	200.806.250	100	1.004.031.250	
	dak	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	Orang	43	43	-	45	20.000.000	47	20.000.000	48	20.000.000	49	20.000.000	50	20.000.000	50	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	mendapat kan Layanan Pengaduan atau Penjangka uan korban Tingkat Kabupaten /Kota																	
	dak	Layanan Pendampungan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapat kan pendampi ngan korban Tingkat Kabupaten /Kota	Orang	43	43		45	20.000.000	47	20.000.000	48	20.000.000	49	20.000.000	50	20.000.000	50	100.000.000	
	dak	Layanan Medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapat kan Layanan Pengaduan atau Penjangka uan Tingkat Kabupaten /Kota	Orang	43	43		45	26.000.000	47	26.000.000	48	26.000.000	49	26.000.000	50	26.000.000	50	130.000.000	
	dak	Layanan Pendampungan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapat kan Layanan Pengaduan atau Penjangka uan bagi Tingkat Kabupaten /Kota	Orang	43	43		45	35.000.000	47	35.000.000	48	35.000.000	49	35.000.000	50	35.000.000	50	175.000.000	
	dak	Layanan Rumah Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapat kan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Orang	43	43		45	26.000.000	47	26.000.000	48	26.000.000	49	26.000.000	50	26.000.000	50	130.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Tingkat Kabupaten/Kota																		
	dak	Layanan Gelar Kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Orang	43	43	39.975.000	45	26.000.000	47	26.000.000	48	26.000.000	49	26.000.000	50	26.000.000	50	130.000.000	
	dak	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban yang mendapat layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	43	43	6.662.500	45	2.666.250	47	2.666.250	48	2.666.250	49	2.666.250	50	2.666.250	50	13.331.250	
	dak	Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	43	43		45	45.140.000	47	45.140.000	48	45.140.000	49	45.140.000	50	45.140.000	50	225.700.000	
							1.035.057.000		0											
		URUSAN PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					764.580.000		993.373.000		1.035.057.000		1.035.057.000		1.035.057.000		1.035.057.000		5.133.601.000	
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	PROGRAM PENGEN DALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate /TFR)	Angka	2,51	2,39		2,38	56.800.000	2,37	36.800.000	2,36	36.800.000	2,35	36.800.000	2,34	36.800.000	2,34	204.000.000	
			Angka Kelahiran	angka	6,2	6,1		6,08		6,06		6,04		6,02		6		6		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19 )																		
		Rate Nett Recent Migrasi	Persen	0,89	0,89		0,89		0,88		0,88		0,88		0,88		0,88		0,88	
		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah regulasi yang dihasilkan	Dokumen	1	1	-	1	20.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	20.000.000	
		Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	-	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemetaan Perkiraa Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	Unit	16	16	22.785.800	16	36.800.000	16	36.800.000	16	36.800.000	16	36.800.000	16	36.800.000	16	184.000.000	
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat	Unit	16	16	22.785.800	16	14.000.000	16	14.000.000	16	14.000.000	16	14.000.000	16	14.000.000	16	70.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk																		
	dak	Pencatatan dan Pengumpulan Data	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	laporan	12	12	-	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	12	22.800.000	12	114.000.000		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	62	62,25	216.000.000	62,5	284.375.000	63	284.375.000	63,5	284.375.000	64	284.375.000	64,5	284.375.000	64,5	1.421.875.000		
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	14	13,7		13,5		13		12,5		12		11,5		11,5		-	
			Rasio akseptor KB	persen	74,41	74,45		74,49		74,54		74,59		74,64		74,69		75,69		-	
			Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	persen	65,73	66,00		66,20		66,40		66,60		66,80		67,00		67,00		-	
			Persentasi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembiayaan Peserta KB Aktif	orang	4704,00	4704,00	-	2325,00	30.000.000	4754,00	30.000.000	4804,00	30.000.000	4854,00	30.000.000	4904,00	30.000.000	4954,00	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Keterangan
		Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
	dak	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh an Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12,00	12,00	-	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	150.000.000	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12,00	12,00	-	12,00	38.275.000	12,00	38.275.000	12,00	38.275.000	12,00	38.275.000	12,00	38.275.000	12,00	191.375.000	
	dak	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayana	laporan	12,00	12,00	-	12,00	9.900.000	12,00	9.900.000	12,00	9.900.000	12,00	9.900.000	12,00	9.900.000	12,00	49.500.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Keterangan
		KB di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	n KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
	dak	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2161,00	2161,00	-	2211,00	28.375.000	2261,00	28.375.000	2361,00	28.375.000	2411,00	28.375.000	2461,00	28.375.000	2461,00	141.875.000	
		Pendayungan Tenaga Penuhluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB B)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina				216.000.000		156.100.000		156.100.000		156.100.000		156.100.000		156.100.000		780.500.000	
	dak	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	86,00	86,00	-	86,00	5.100.000	86,00	5.100.000	99,00	5.100.000	99,00	5.100.000	99,00	5.100.000	99,00	25.500.000	DAK DAN APBD
	hor kader	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	1,00	1,00	216.000.000	1,00	151.000.000	1,00	151.000.000	1,00	151.000.000	1,00	151.000.000	1,00	151.000.000	1,00	755.000.000	PROGUUL PENDAMPIANGAN KELUSTUNTING 30 JT
		Pemberdayaan dan peningkatan	Jumlah kegiatan edukasi/s	kegiatan	1,00	1,00	-	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		an Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertamaan ber KB	osialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan																	
	dak	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting di kampung KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit		-	8,00	60.000.000	8,00	60.000.000	8,00	60.000.000	8,00	60.000.000	8,00	60.000.000	8,00	300.000.000		
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	62	62,25	548.580.000	62,5	652.198.000	63	713.882.000	63,5	713.882.000	64	713.882.000	64,5	713.882.000	65	3.507.726.000	
			Indeks Lansia Berdaya	angka	na	59,4		59,8		60,2		60,6		61		61,4		61,4		-
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	angka	86,86	86,96		87,97		88,96		89,96		90,96		91,96		91,96		-
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	kegiatan	1	1	-	1	264.000.000	1	204.000.000	1	204.000.000	1	204.000.000	1	204.000.000	1	1.080.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
	dak	Pendampingan Keluarga Beresiko stunting ( Termasuk remaja, Calon Pengantin /Calon PUS,ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran , Baduta Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	12	12														1.020.000.000
	dak	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting ( termasuk remaja dan calon Pengantin ,Calon PUS,ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	12	12														300.000.000
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Kelompok	64	64	548.580.000	64	388.198.000	64	509.882.000	114	509.882.000	114	509.882.000	114	509.882.000	114	2.427.726.000	
	dak dan hak kader dan gendre	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader )	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	Orang	223	223	548.580.000	223	388.198.000	223	509.882.000	223	509.882.000	223	509.882.000	223	509.882.000	223	2.427.726.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)																	
		URUSAN SOSIAL				8.739.181.154	100%	9.800.404.000	100%	8.331.404.000	100%	8.331.404.000	100%	8.331.404.000	100%	8.331.404.000	100	#####	#####	
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	Persen	100%	100%	5.951.581.166	100%	5.971.224.000	100%	5.929.344.000	100%	5.929.344.000	100%	5.929.344.000	100	#####	#####		
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pesen	100%	100%	4.964.648.537	100%	5.071.320.000	100%	5.071.320.000	100%	5.071.320.000	100%	5.071.320.000	100%	5.071.320.000	100	#####	#####	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	504	504	4.964.648.537	504	5.035.200.000	504	5.035.200.000	504	5.035.200.000	504	5.035.200.000	504	5.035.200.000	504	#####	#####	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					-		36.120.000		36.120.000		36.120.000		36.120.000		36.120.000		180.600.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persen	100%	100%	-	100%	50.000.000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	
	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta	Paket	37	0	-	63	50.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	63	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Kelengkapan pannya	Atribut Kelengkapan																	
		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persentas e pemenuhan layanan administra si umum perangkat daerah	Pesen	100%	100%	158.906.819	100%	157.500.000	100%	157.620.000	100%	157.620.000	100%	157.620.000	100%	157.620.000	100	787.980.000	
		Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	12.500.000	
		Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	38.789.970	7	25.000.000	7	25.120.000	7	25.120.000	7	25.120.000	7	25.120.000	7	125.480.000	
		Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	12.461.149	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	50.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	102.264.000	24	120.000.000	24	120.000.000	24	120.000.000	24	120.000.000	24	120.000.000	24	600.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentas e Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	13	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	30	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	688.157.810	100	496.404.000	100	504.404.000	100	504.404.000	100	504.404.000	100	504.404.000	100	2.514.020.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	43.237.810	12	32.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	72	192.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	644.920.000	12	464.404.000	12	464.404.000	12	464.404.000	12	464.404.000	12	464.404.000	72	2.322.020.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Persen	100	100	139.868.000	100	146.000.000	100	146.000.000	100	146.000.000	100	146.000.000	100	146.000.000	100	730.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan yang	Unit	27	27	69.200.000	35	118.000.000	35	118.000.000	35	118.000.000	35	118.000.000	35	118.000.000	35	590.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	55	20.800.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	8.000.000	55	40.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	6	6	49.868.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi																	
		Meningkatkan Layanan sosial bagi PPKS	PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi sinyal dalam Pelayanan Sosial	Persen	100	100	791.799.700	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	5.485.000.000
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		-
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga sosial yang aktif	Persen	100	100	791.799.700	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	1.097.000.000	100	5.485.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	60	701.256.100	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	5.000.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguasa	Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga	Sertifikat	3	3	90.543.600	3	97.000.000	3	97.000.000	3	97.000.000	3	97.000.000	3	97.000.000	18	485.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan	
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		n Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100	1.726.315.048	100	2.630.680.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	1.203.560.000	100	#####		
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-
			Persentase Gelangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-
			Persentase Pemerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-
			Persentase Pemerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterang a
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Reabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Orang	750	750	1.371.956.914	925	1.872.120.000	925	445.000.000	925	445.000.000	925	445.000.000	925	445.000.000	5.375	3.652.120.000	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	459	459	543.868.450	350	300.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	2.409	1.500.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	459	459	133.615.000	350	75.000.000	400	75.000.000	400	75.000.000	400	75.000.000	400	75.000.000	2.409	375.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Orang	22	22	35.186.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	147	150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Kabupaten /Kota																		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	50	50	28.974.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	300	100.000.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	50	50	10.399.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	300	678.560.000	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PKKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Orang	2792	2792	354.358.134	2792	758.560.000	2792	758.560.000	2792	758.560.000	2792	758.560.000	2792	758.560.000	#####	3.792.800.00	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang	75	75	47.300.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	275	150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		an Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota																		
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten /Kota	orang	75	75	44.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	275	150.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	5	5	7.500.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	30	50.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	30	30	166.756.330	250	598.560.000	250	598.560.000	250	598.560.000	250	598.560.000	250	598.560.000	1.280	#REF!	PROGULISTANALANSIA300JT DAN GRAHA DISABILITAS300JT
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	Dokumen	10	10	88.801.804	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	70	450.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Kabupaten/Kota	an Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100	100	70.905.900	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	7	7,3		7,35		7,4		7,45		7,5		7,55		45		
			Persentase Daerah yang Melaksakan akan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	7	7,3		7,35		7,4		7,45		7,5		7,55		45		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	layanan	17	17	70.905.900	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	100.000.000	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	Orang	2119	2119	7.438.300	1919	10.000.000	1919	10.000.000	1919	10.000.000	1919	10.000.000	1919	10.000.000	11.714	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Didata																		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1271	1271	63.467.600	1271	10.000.000	1271	10.000.000	1271	10.000.000	1271	10.000.000	1271	10.000.000	1271	10.000.000	6.355	50.000.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	90.911.840	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	282.500.000
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemuliharaan Sosial	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		100	-
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada	Persen	100	100	14.543.000	100	36.500.000	100	36.500.000	100	36.500.000	100	36.500.000	100	36.500.000	100	36.500.000	100	182.500.000

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		korban bencana																		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	-	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	300	20.000.000	1.800	100.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	13.100.000	300	15.000.000	300	15.000.000	300	15.000.000	300	15.000.000	300	15.000.000	1.800	75.000.000	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	1.443.000	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	1.800	7.500.000	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	Orang	30	30	76.368.840	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	180	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Kabupaten/Kota																		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	76.368.840	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	180	100.000.000	
		PROGRAM PENGETAHUAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Per센	100	100	107.667.500	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara	makam	98	98	107.667.500	98	25.000.000	98	25.000.000	98	25.000.000	98	25.000.000	98	25.000.000	98	125.000.000	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	98	98	107.667.500	98	25.000.000	98	25.000.000	98	25.000.000	98	25.000.000	98	25.000.000	98	125.000.000	



Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang merencanakan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, serta memperluas cakupan layanan perlindungan sosial. Pertama, untuk mendukung peningkatan pembangunan kesetaraan gender, akan dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan jumlah 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan kemudian juga dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan jumlah 3 Program, 8 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Kedua, untuk memperkuat perlindungan sosial masyarakat, dilaksanakan oleh bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Rehabilitas Sosial, dengan jumlah 4 program, 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Dengan demikian, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, perlindungan sosial yang menyeluruh, serta pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan

Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menetapkan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesetaraan gender, serta memberikan pelayanan yang lebih inklusif kepada kelompok rentan. Program prioritas dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Proram ini mengakomodir program unggulan Pengembangan Kota Baru (Pemanfaatan Tanah Eks Erfach) Pelaksanaan Sekolah Ibu
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		
			<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
			<b>Pendampingan Keluarga Beresiko stunting ( Termasuk remaja, Calon Pengantin,/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca Salin/Kalahirhan , Baduta Balita)</b>	Proram ini mengakomodir program unggulan Kawal Golden Ages (1000 Hari Pertama Kehidupan)/S tunting Pendampingan Keluarga Stunting
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya Jumlah PPKS yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial		
			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Proram ini mengakomodir program unggulan Istana Lansia dan Graha Disabilitas Operasional Istana Lansia (bantuan permakanan, wirid bulanan, pemeriksaan kesehatan gratis, studi dakwah) Promosi dan Sosialisasi Sekolah Lansia Penyediaan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas DAN Operasional Graha Disabilitas (permakanan bagi disabilitas terlantar, peringatan HDI, pelatihan bagi penyandang disabilitas (10 jenis)

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan 4 program prioritas yaitu :

1. Sekolah ibu/ sekolah keluarga
2. Pendampingan keluarga stunting
3. Istana lansia
4. Graha disabilitas

Melalui program Sekolah Keluarga, ibu-ibu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang pola asuh yang tepat, kesehatan dan gizi keluarga, komunikasi efektif, serta penguatan nilai-nilai karakter dan moral. Program ini juga menjadi sarana untuk mencegah berbagai permasalahan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta dampak negatif perkembangan teknologi digital. Penguatan kapasitas keluarga melalui Sekolah Keluarga selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat, berkarakter, serta berdaya saing. Dengan adanya Sekolah Keluarga, diharapkan lahir keluarga-keluarga tangguh yang mampu menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari berbagai tantangan zaman. Lebih jauh, Sekolah Keluarga berperan sebagai investasi sosial jangka panjang. Peningkatan kualitas pengasuhan di dalam rumah akan menghasilkan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Hal ini akan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pada ketahanan keluarga. Oleh karena itu, program Sekolah Keluarga perlu menjadi bagian integral dalam Renstra .Daerah sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi dinamika global di masa mendatang.

Pendampingan keluarga berisiko stunting adalah upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini faktor risiko, edukasi gizi dan pola asuh, serta fasilitasi akses kesehatan dan bantuan sosial oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Kegiatan ini menyasar calon pengantin, ibu hamil, pascasalin, dan balita hingga usia 5 tahun, serta melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan status gizi anak dan menurunkan angka stunting.

Pelaksanaan kegiatan istana lansia yang akan dilaksanakan berupa kegiatan pengembangan yang dapat diadakan untuk Lanjut Usia diantaranya:

- a. Sekolah Lansia (Seluruh Lansia )
- b. Bimbingan Mental, Spiritual dan Keagamaan (seluruh Lansia)
- c. Kolling ( Konseling Keliling)
- d. Pemeriksaan Kesehatan bagi lanjut usia dan bimbingan fisik bagi lansia
- e. Wisata Dakwah
- f. Wirid lansia (pemantapan Praktik Ibadah)

Graha Disabilitas merupakan tempat yang dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan diri para penyandang disabilitas melalui Pendidikan dan Kegiatan Pengembangan Keterampilan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Graha Disabilitas diharapkan mampu menjadi ruang inspirasi dan inovasi guna untuk menggugah semangat wirausaha dan kemandirian bagi penyandangan disabilitas. Graha Disabilitas dapat dijadikan inspirasi dan rumah kreatif untuk mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Melalui Graha Disabilitas ini dapat mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan kota inklusif yang ramah disabilitas. Sehingga nantinya keberadaan penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam memperoleh hak dan bersaing di berbagai bidang. Adapun kegiatan pengembangan keterampilan yang dapat diadakan untuk penyandang disabilitas diantaranya:

1. Kegiatan Pendidikan

- a) Pelatihan Bahasa Isyarat (Tuna Rungu Wicara dan pelayan Publik)

- b) Pelatihan Braille (Tuna Netra)
  - c) Pelatihan Membaca Alqur'an (Tuna Rungu)
  - d) Bimbingan Mental, Spiritual dan Keagamaan (seluruh disabilitas)
2. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
- a) Pelatihan Membatik (disabilitas fisik dan Rungu Wicara)
  - b) Pelatihan Merajut (Disabilitas Netra, disabilitas fisik dan Rungu Wicara)
  - c) Pelatihan Cakap Teknologi (Disabilitas Netra)
  - d) Pelatihan Massage dan Topung (Disabilitas Netra)
  - e) Pelatihan Tataboga (pengembangan kube KDI)
  - f) Pelatihan Barbershop (Tuna Rungu Wicara)
  - g) Pelatihan Junior Barista

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TAHUN DAN TARGET KINERJA						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Indeks	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TAHUN DAN TARGET KINERJA						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Prediket	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,2	6,1	6,08	6,06	6,04	6,02	6	
5	Percentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	Persen	74	75	76	77	78	79	80	
6	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	69,3	70,00	70,50	71,5	72	74,5	75	
7	Percentase PPKS yang tertangani	Persen	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan arah kebijakan strategis dan hasil yang diharapkan selama periode 2025–2030.

1. Predikat Penganugrahan Parahiya Ekapraya (PPE)

Capaian predikat PPE ditargetkan meningkat dari *Pratama* pada tahun 2024 menjadi *Madya* mulai tahun 2028 hingga 2030. Peningkatan ini menunjukkan penguatan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan, melalui sinergi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat daerah.

2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Target capaian KLA meningkat dari kategori *Nindya* menuju *Utama* pada tahun 2030. Perubahan predikat ini mencerminkan peningkatan komitmen dan

efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara lintas sektor, termasuk penguatan kelembagaan Gugus Tugas KLA serta optimalisasi pemenuhan hak anak di lima klaster utama.

3. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) TFR diproyeksikan menurun dari 2,51 anak per keluarga pada tahun 2024 menjadi 2,34 pada tahun 2030. Penurunan ini diharapkan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, serta integrasi pengendalian penduduk dalam pembangunan keluarga berkualitas.
4. Angka Kelahiran Remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19 tahun) ASFR ditargetkan menurun secara gradual dari 6,1 menjadi 6,0 per 1.000 remaja perempuan usia 15–19 tahun pada akhir periode. Target ini diupayakan melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja, peningkatan akses informasi dan layanan ramah remaja, serta optimalisasi peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
5. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Persentase PUS yang memperoleh fasilitasi 1000 HPK meningkat dari 74 persen pada tahun 2024 menjadi 80 persen pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan terintegrasi antara sektor kesehatan, kependudukan, dan pemberdayaan keluarga.
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditargetkan meningkat dari 69,3 persen menjadi 75 persen pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Perangkat Daerah dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan berbasis hasil, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip *good governance*.
7. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Persentase PPKS yang tertangani ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2030 dari baseline 97 persen tahun 2024. Hal ini mencerminkan

optimalisasi pelaksanaan layanan sosial yang komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sinergi lintas sektor dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator tersebut menunjukkan arah pembangunan yang progresif menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, penguatan kelembagaan sosial, dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029 disusun sebagai ukuran utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak di daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No	Indikator	Satuan	2024	2025	Target Tahun					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kemiskinan	%	4,71	4,71	4,11	3,51	2,90	2,30	1,70	
2	Prevalensi Stunting	%	13,70	13,70	12,45	11,20	9,95	8,70	8,90	
3	Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,60	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
4	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	
5	Indeks Pembangunan Gender	Angka	98,23	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65	
6	Percentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	50,43	50,43	50,63	50,83	51,03	51,23	51,43	
7	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	85,74	85,8	85,84	85,88	85,9	85,95	85,98	
9	Angka PPKS	Angka	3,69	3,35	3,45	3,3	3	2,95	2,85	
10	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3749	3060	2714	2368	2023	1671	1325	
11	Percentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Percentase lembaga sosial yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Percentase PPKS yang tertangani	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	
15	Percentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	%	15,38	15,40	15,42	15,44	15,46	15,48	15,50	
17	Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26,17	26,17	26,07	26,00	25,97	25,90	25,89	
19	IDG	Angka	73,05	73,05	75,06	76,00	77,00	78,00	79,00	
20	Predikat KLA	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	

No	Indikator	Satuan	2024	2025	Target Tahun					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
21	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
22	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	
23	Percentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62	62, 25	62,5	63	63,5	64	64,5	
24	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14	13, 7	13,5	13	12,5	12	11,5	
25	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	66,46	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	
26	Percentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	74	75	76	77	78	79	80	
27	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,51	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	
28	Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19 )	Angka	6,2	6,1	6,08	6,06	6,04	6,02	6	
29	Rate Nett Recent Migrasi	persen	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
30	Rasio akseptor KB	persen	74,41	74,45	74,49	74,54	74,59	74,64	74,69	
31	Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	persen	65.73	66	66.20	66.40	66.60	66.80	67	
32	Persentasi Kampung Keluarga Berkulitas Mandiri	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Indeks Lansia Berdaya	Angka	NA	59,4	59,8	60,2	60,6	61	61,4	
34	Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	Angka	86,86	86,96	87,96	88,96	89,96	90,96	91,96	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui Renstra ini diharapkan terwujud peningkatan kualitas pelayanan sosial, penurunan permasalahan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk yang efektif, pembangunan keluarga yang berketahanan, serta peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga sosial, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

**Padang Panjang,**

**2025**

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**